

**YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM DAERAH RIAU
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

**ANALISIS PELAKSANAAN KEWENANGAN PENGHULU KAMPUNG
DALAM MEMBINA KEHIDUPAN SOSIAL BUDAYA MASYARAKAT
DI KAMPUNG ADAT LUBUK JERING
KECAMATAN SUNGAI MANDAU KABUPATEN SIAK**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu
Bidang Ilmu Sosial Program Studi Administrasi Publik
Pada Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik
Universitas Islam Riau

**Zandri Saputra
Nim. 137110377**

**PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI PUBLIK
PEKANBARU
2020**

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

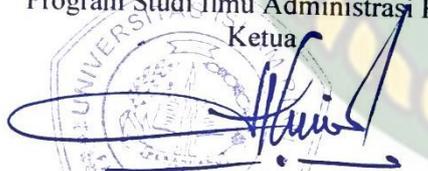
PERSETUJUAN TIM PEMBIMING

Nama : Zandri Saputra
Npm : 137110377
Program Studi : Administrasi Publik
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)
Judul Skripsi : Analisis Pelaksanaan Kewenangan Penghulu Kampung Dalam Membina Kehidupan Sosial Budaya Masyarakat Di Kampung Adat Lubuk Jering Kecamatan Sungai Mandau Kabupaten Siak

Format sistematika dan pembahasan masing-masing bab dan sub bab dalam skripsi ini telah dipelajari dan dinilai relatif telah memenuhi ketentuan ketentuan normatif dan Kriteria metode penelitian ilmiah, oleh karena itu dinilai layak serta dapat disetujui untuk diuji dalam sidang ujian komprehensif..

Pekanbaru, 27 Desember 2019

Turut Menyetujui
Program Studi Ilmu Administrasi Publik
Ketua


Hendry Andry, S.Sos., M.Si

Pembimbing


Drs. Syapril Abdullah, M.Si

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

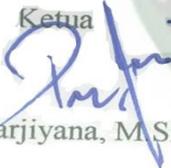
PERSETUJUAN TIM PENGUJI

Nama : Zandri Saputra
Npm : 137110377
Program Studi : Administrasi Publik
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)
Judul Skripsi : Analisis Pelaksanaan Kewenangan Penghulu Kampung Dalam Membina Kehidupan Sosial Budaya Masyarakat Di Kampung Adat Lubuk Jering Kecamatan Sungai Mandau Kabupaten Siak

Naskah skripsi ini secara keseluruhan dinilai telatiff telah memenuhi ketentuan-ketentuan metode penelitian ilmiah, oleh karena itu Tim Penguji Ujian Konferehensif Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dapat menyetujui dan menerimanya untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana.

Pekanbaru, 27 Februari 2020

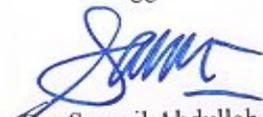
Ketua


Drs. Parjiyana, M.Si

Sekretaris,


Andri Kurniawan, B.PM, M.Si

Anggota


Drs. Syapril Abdullah, M.Si

Wakil Dekan I Bid. Akademis,


Dr. H. Panca Setyo Prihatin, S.IP, M.Si

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

BERITA ACARA UJIAN KONPREHENSIF SKRIPSI

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Nomor: 042. /UIR-Fs/Kpts/2020 tanggal 26 Feb 2020 maka dihadapan Tim Penguji pada hari ini, KAMIS tanggal, 27 Feb 2020 jam 09.00 – 10.00 Wib, bertempat di ruang sidang Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Pekanbaru telah dilaksanakan ujian konprehensif skripsi atas mahasiswa:

N a m a : Zandri Saputra
N P M : 137110377
Program Studi : Administrasi Publik
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)
Judul Skripsi : Analisis Pelaksanaan Kewenangan Penghulu Kampung dalam Membina Kehidupan Sosial Budaya Masyarakat di kampung Adat Kecamatan Sungai Mandau Kabupaten Siak.

Nilai Ujian : Angka : "761" ; Huruf : " B+"
Keputusan Hasil Ujian : Lulus / Tidak Lulus / Ditunda
Tim Penguji :

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Drs. Parjiyana, M.Si.	Ketua	1.
2.	Andri Kurniawan, BPM., M.Si.	Sekretaris	2.
3.	Drs. Syapril Abdullah, M.Si.	Anggota	3.
4.	Made Devi Wedayanti, S.AP., M.Si.	Notulen	4.

Pekanbaru, 27 Februari 2020

An. Dekan,

Dr. H. Panca Setyo Prihatin, S.IP, M.Si.
Wakil Dekan I Bid Akademik

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FISIPOL UNIVERSITAS ISLAM RIAU
NOMOR : 042/UIR-FS/KPTS/2020
TENTANG TIM PENGUJI UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FISIPOL UNIVERSITAS ISLAM RIAU

Menimbang : 1. Bahwa untuk mengevaluasi tingkat kebenaran penerapan kaidah dan metode penelitian ilmiah dalam naskah Skripsi Mahasiswa maka dipandang perlu untuk diuji dalam forum ujian komprehensif.
2. Bahwa Tim Penguji dimaksud perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Dekan.

Mengingat : 1. UU Nomor: 20 Tahun 2003 Tentang Pendidikan Nasional
2. PP Nomor: 60 Tahun 1999 Tentang Sistem Pendidikan Tinggi
3. SK. Mendiknas RI Nomor 045/U/2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi.
4. SK Rektor UIR Nomor: 141/UIR/KPTS/2009 tentang Kurikulum Baru Fisipol UIR
5. SK Rektor UIR Nomor: 117/UIR/KPTS/2012, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas dan Direktur Pascasarjana UIR masa bakti 2012-2016.

Memperhatikan : Rekomendasi Ka Prodi dan Wakil Dekan I Bidang Akademik (WD.I) tentang Usulan Tim Penguji Ujian Komprehensif Skripsi Mahasiswa.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : 1. Dosen Tim Penguji Ujian Komprehensif Skripsi Mahasiswa atas nama yang tersebut dibawah ini :

Nama	: Zandri Saputra
N P M	: 137110377
Program Studi	: Administrasi Publik
Jenjang Pendidikan	: Strata Satu (S.1)
Judul Skripsi	: Analisis Pelaksanaan Kewenangan Penghulu Kampung dalam Membina Kehidupan Sosial Budaya Masyarakat Di Kampung Adat Kecamatan Sungai Mandau Kabupaten Siak.

1. Drs. Parjiyana.,M.Si Sebagai Ketua merangkap Penguji
 2. Andry Kurniawan.,BPM.,M.Si Sebagai Sekretaris merangkap Penguji
 3. Drs. Syapril Abdullah,M.Si Sebagai Anggota merangkap Penguji
 4. Made Devi Wedayanti.,S.Ap.,M.Si Sebagai Notulen
2. Tim Penguji melaksanakan tugas dan mengisi serta menandatangani berkas ujian sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Fakultas.
3. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.

Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada Tanggal : 26 Februari 2020
An. Dekan,

DR.H. Panca Setyo Prihatin.,S.Ip.,M.Si
Wakil Dekan I Bid. Akademik

Tembusan Disampaikan Kepada :

- 1.Yth. Bapak Rektor UIR
- 2.Yth. Sdr. Ka. Biro Keuangan UIR
- 3.Yth. Ketua Prodi AP
- 4.Arsip -----sk.penguji-----

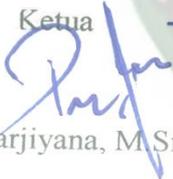
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Zandri Saputra
Npm : 137110377
Program Studi : Administrasi Publik
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)
Judul Skripsi : Analisis Pelaksanaan Kewenangan Penghulu Kampung Dalam Membina Kehidupan Sosial Budaya Masyarakat Di Kampung Adat Lubuk Jering Kecamatan Sungai Mandau Kabupaten Siak

Naskah skripsi ini benar telah dilakukan perbaikan dan penyempurnaan oleh Mahasiswa bersangkutan sesuai dengan koreksi dan masukan Tim Penguji dan dinilai telah memenuhi persyaratan administratif dan akademis, oleh karena itu dapat disahkan sebagai Karya Ilmiah.

Pekanbaru, 17 Maret 2020

Ketua

Drs. Parjiyana, M.Si

An. Tim Penguji
Sekretaris,


Andri Kurniawan, B.PM, M.Si

Turut Menyetujui


Wakil Dekan I Bid. Akademis,
Dr. H. Panca Setyo Prihatin, S.IP, M.Si

Program Studi Administrasi Publik
Ketua

Hendry Andry, S.Sos, M.Si

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan kekuatan dan semangat dalam menyelesaikan Usulan Penelitian ini **“Analisis Pelaksanaan Kewenangan Penghulu Kampung Dalam Membina Kehidupan Sosial Budaya Masyarakat Di Kampung Adat Lubuk Jering Kecamatan Sungai Mandau Kabupaten Siak”**. Usulan Penelitian ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar sarjana Ilmu Administrasi Publik pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Pekanbaru.

Pada kesempatan yang baik ini tak lupa penulis menyampaikan terimakasih yang setulus-tulusnya baik secara langsung maupun tidak langsung atas segala dukungan, bantuan, bimbingan, pengarahan, nasehat dan pemikiran dari berbagai pihak selama proses studi dan juga selama proses penyusunan Skripsi ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi., SH. MCL, yang menjabat sebagai rektor Universitas Islam Riau
2. Bapak Dr. H. Moris Adidi Yogia., M.Si yang menjabat sebagai Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik yang juga sebagai pembimbing ke I yang telah memberikan arahan dan bimbingan dengan sabar untuk meluangkan waktunya, tenaga dan fikiran sehingga penulis dapat menyelesaikan Usulan Penelitian ini
3. Bapak Hendry Andry., S.Sos., M.Si sebagai ketua Program Studi Ilmu Administrasi Publik
4. Bapak Drs. Syapril Abdullah, M.Si yang juga bertindak sebagai pembimbing yang telah memberikan arahan dan bimbingan dengan sabar untuk meluangkan waktunya, tenaga dan fikiran sehingga penulis dapat menyelesaikan Usulan Penelitian ini

5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Islam Riau yang dalam hal ini tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang mana telah mendidik dan memberikan dorongan serta arahan selama perkuliahan.
6. Teristimewa untuk Ayah dan Ibu tercinta atas segala pengorbanan dan kasih sayang serta air mata dan doanya untuk ananda.
7. Dan juga tidak lupa buat Kawan-kawan angkatan 2013 dan someone yang telah memberikan bantuan dan motivasi untuk menyelesaikan skripsi ini yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu semoga kita semua sukses, amin.

Akhir kata penulis berharap semoga Usulan Penelitian ini akan dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkan dan semoga ilmu yang penulis peroleh ini dapat berguna untuk pengembangan ilmu pengetahuan serta bagi nusa dan bangsa, Amin.

Pekanbaru, Agustus 2019
Penulis
Ttd

Zandri Saputra

DAFTAR ISI

	Halaman
PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING	ii
PERSETUJUAN TIM PENGUJI.....	iii
BERITA ACARA UJIAN KOMFERENSIF SKRIPSI.....	iv
PENGESAHAN SKRIPSI.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR.....	xi
PERNYATAAN KEASLIAN NASKAH.....	xii
ABSTRAK	xiii
ABSTRACT.....	xiv
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	12
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	13
BAB II. STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PEMIKIRAN	
A. Studi Kepustakaan	15
B. Penelitian terdahulu	27
C. Kerangka Pemikiran	28
D. Konsep Operasional	30
E. Teknik Pengukuran	31
BAB III. METODE PENELITIAN	
A. Tipe Penelitian	34
B. Lokasi Penelitian.....	35
C. Populasi dan sampel	36
D. Teknik Penarikan Sampel	36
E. Jenis dan Sumber Data.....	37

F. Teknik Pengumpulan Data.....	37
G. Teknik Analisis Data.....	38
H. Jadwal Waktu Kegiatan Penelitian	38

BAB IV DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN

A. Deskripsi Singkat Kabupaten Siak.....	38
B. Sejarah Singkat Kampung Adat Lubuk Jering.....	41
C. Deskripsi Singkat Pemerintahan Kampung Lubuk Jering.....	43
D. Struktur Organisasi.....	45
E. Tugas dan Fungsi Pemerintahan Kampung Adat Lubuk Jering...	46

BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Identitas Responden Penelitian	51
B. Hasil dan Pembahasan Penelitian	53
C. Faktor Penghambat Pelaksanaan Kewenangan Penghulu Kampung Dalam Membina Kehidupan Sosial Budaya Masyarakat di Kampung Adat Lubuk Jering Kecamatan Sungai Mandau Kabupaten Siak	65

BAB VI PENUTUP

A. Kesimpulan	67
B. Saran.....	69

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1.1. : Kondisi Kehidupan Sosial dan Budaya Kampung Adat Lubuk Jering.....	10
I.2. : Operasional Variabel Penelitian Analisis Kewenangan Penghulu Kampung dalam Membina Kehidupan Sosial Budaya Masyarakat di Kampung Adat Lubuk Jering Kecamatan Sungai Mandau Kabupaten Siak	31
II. 1. : Jumlah Populasi Dan Sample Penelitian	36
II. 2 : Jadwal Pelaksanaan Penelitian Analisis Kewenangan Penghulu Kampung Dalam Membina Kehidupan Sosial Budaya Masyarakat di Kampung Adat Lubuk Jering Kecamatan Sungai Mandau Kabupaten Siak	38
V. 1. : Distribusi Responden penelitian berdasarkan Jenis Kelamin.....	52
V.2. : Distribusi responden penelitian berdasarkan Umur	52
V.3. : Distribusi responden penelitian berdasarkan Tingkatan Pendidikan.....	53
V.4. : Distribusi jawaban responden penelitian mengenai Perencanaan....	55
V.5. : Distribusi jawaban responden penelitian mengenai Bimbingan	58
V.6. : Distribusi jawaban responden penelitian mengenai Pengawasan....	60
V.7. : Distribusi jawaban responden penelitian mengenai Evaluasi	63
V.8. : Distribusi jawaban responden penelitian tentang Pelaksanaan Kewenangan Penghulu Kampung Dalam Membina Kehidupan Sosial Budaya Masyarakat di Kampung Adat Lubuk Jering Kecamatan Sungai Mandau Kabupaten Siak.....	64

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
II.1 : Kerangka Pemikiran Tentang Analisis Kewenangan Penghulu Kampung Dalam Membina Kehidupan Sosial Budaya Masyarakat di Kampung Adat Lubuk Jering Kecamatan Sungai Mandau Kabupaten Siak.....	28
IV.1 : Struktur Pemerintahan Kampung Adat Lubuk Jering.....	50



SURAT PERNYATAAN

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau peserta ujian Skripsi yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Zandri Saputra
NPM : 137110377
Program Studi : Administrasi Publik
Judul Usulan Penelitian : Analisis Kewenangan Penghulu Kampung dalam Membina Kehidupan Sosial Budaya Masyarakat di Kampung Adat Lubuk Jering Kecamatan Sungai Mandau Kabupaten Siak

Atas naskah yang didaftarkan pada ujian Skripsi ini beserta seluruh dokumen persyaratan yang melekat padanya dengan ini saya menyatakan:

1. Bahwa, naskah Skripsi ini adalah benar hasil karya saya sendiri (tidak karya plagiat) yang saya tulis sesuai dan mengacu kepada kaidah-kaidah metode penelitian ilmiah dan penulisan karya ilmiah.
2. Bahwa, keseluruhan persyaratan administratif, akademik dan keuangan yang melekat padanya benar telah saya penuhi sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Fakultas dan Universitas.
3. Bahwa, apabila dikemudian hari ditemukan dan terbukti secara sah bahwa saya ternyata melanggar dan atau belum memenuhi sebagian atau keseluruhan atas pernyataan butir 1 dan 2 tersebut diatas, maka saya menyatakan bersedia menerima sanksi pembatalan hasil ujian konprehensif yang telah saya ikuti serta sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan Fakultas dan Universitas serta Hukum Negara RI.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa tekanan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, Agustus 2019
Pelaku Pernyataan



Zandri Saputra

Analisis kewenangan Penghulu Kampung dalam Membina Kehidupan Sosial Budaya Masyarakat di Kampung Adat Lubuk Jering Kecamatan Sungai Mandau Kabupaten Siak

Abstrak

Oleh

Zandri Saputra

Kata Kunci : Kewenangan, pembinaan kehidupan sosial dan budaya

Penelitian ini bertujuan untuk Mengetahui Pelaksanaan kewenangan Penghulu Kampung dalam Membina Kehidupan Sosial Budaya Masyarakat di Kampung Adat Lubuk Jering Kecamatan Sungai Mandau Kabupaten Siak, dengan beberapa fenomena yang terjadi mengenai Bahwa Penghulu Kampung kurang Efektif memberikan bimbingan dan pembinaan terhadap masyarakat kampung, Belum terciptanya kerjasama yang baik antara Penghulu Kampung dengan lembaga pemasyarakatan Kampung dan Kurangnya pengawasan yang dilakukan oleh Penghulu Kampung terhadap kehidupan masyarakat Kampung Adat Lubuk Jering yang masih membutuhkan bimbingan dari pemerintahan Kampung., jenis penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif dengan lokasi penelitian di Desa Adat Lubuk Jering Kabupaten Siak. Dengan kuesioner sebagai pengumpulan data dan wawancara serta observasi sebagai pelengkap informasi penelitian. Setelah melakukan penelitian pengumpulan dan serta pembahasan mengenai Pelaksanaan kewenangan Penghulu Kampung dalam Membina Kehidupan Sosial Budaya Masyarakat di Kampung Adat Lubuk Jering Kecamatan Sungai Mandau Kabupaten Siak mengenai perencanaan melalui penganggaran kegiatan pembinaan pada anggaran pendapatan dan belanja Kampung yang disusun, bimbingan dari penghulu dalam kegiatan pembinaan social budaya, pengawasan dalam kegiatan pembinaan dan penilaian akhir dari kegiatan pembinaan kehidupan social budaya masyarakat kampung dapat disimpulkan bahwa Pelaksanaan Kewenangan Penghulu Kampung Dalam Membina Kehidupan Sosial Budaya Masyarakat Di Kampung Adat Lubuk Jering Kecamatan Sungai Mandau Kabupaten Siak dalam dengan rata-rata 26 atau 46% maka di kategorikan cukup terlaksana. Adapun beberapa factor penghambat yaitu respon masyarakat sebagai target dari pembinaan kehidupan social budaya masih rendah sehingga partisipasi masyarakat masih cukup rendah kemudian koordinasi antar lembaga yang ada di Kampung Belum maksimal antara Penghulu Kampung dengan lembaga pemasyarakatan Kampung seperti Karang Taruna, Lembaga Adat, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat desa dan lembaga Perempuan, sehingga Penghulu Kampung tidak efektif dalam melakukan pengadaan acara adat/kebudayaan dalam pelestarian kebudayaan masyarakat Kampung serta pengawasan yang dilakukan oleh Penghulu.

Analysis of the authority of Village Officials in Fostering Social and Cultural Life of Communities in Kampung Adat Lubuk Jering Sungai Mandau District Siak Regency

Abstract

By

Zandri Saputra

Keywords: Authority, fostering social and cultural life

This study aims to find out the implementation of the authority of village headmen in fostering social and cultural life of the community in the Kampung Adat Lubuk Jering Sungai Mandau District, Siak Regency, with several phenomena that occur that the headman of the village is less effective in providing guidance and guidance to the village community, not yet created cooperation both between the Village Head and the penitentiary of the Village and the lack of supervision carried out by the Village Head on the life of the Lubuk Jering Customary community who still need guidance from the village administration. This type of research is quantitative descriptive with the location of the research in the Adat Lubuk Jering Village Siak Regency. With a questionnaire as data collection and interviews and observation as a complement to research information. After conducting research, gathering and discussing the implementation of the authority of the Village Head in cultivating the Social and Cultural Life of the Community in the Customary Village of Lubuk Jering, Sungai Mandau District, Siak Regency, regarding planning through budgeting of financing activities in the village's budgeted income and expenditure, guidance from the headman in guiding activities socio-culture, supervision in the development activities and the final assessment of social culture and social life development activities can be concluded that the Implementation of the Authority of Village Head in Developing Social and Cultural Life of the Community in Lubuk Jering Customary Village in Mandau River District in Siak Regency with an average of 26 or 46% then categorized quite done. As for some inhibiting factors, namely the community's response as a target of fostering social and cultural life is still low so that community participation is still quite low, then coordination between institutions in the village is not maximal between the village headman and village correctional institutions such as Youth Organization, Customary Institutions, Village Community Empowerment Institutions and women's institutions, so that the Village Head is not effective in procuring customary / cultural events in the preservation of the culture of the Kampung community as well as the supervision carried out by the Village Head

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Administrasi adalah merupakan keseluruhan proses kerja sama antara dua orang atau lebih yang didasarkan oleh rasionalitas tertentu dalam rangka pencapaian tujuan yang ditentukan sebelumnya dengan memanfaatkan sarana dan prasarana tertentu secara berdaya guna dan hasil guna Siagian (dalam Zulkifli,2005;20), administrasi dan manajemen merupakan sebagai ilmu dan seni didalam pengelolaan dan mengatasi permasalahan dalam organisasi yang mana terdapat sekelompok orang yang bekerjasama untuk mencapai suatu tujuan.

Pada setiap organisasi publik maupun swasta dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran secara berhasil guna dan berdaya guna memerlukan adanya, pembagian kerja, pelimpahan wewenang sampai kepada rincian tugas secara jelas di setiap masing-masing pihak yang terkait dalam organisasi tersebut. Di samping itu, dalam suatu organisasi harus ditetapkan pula kaitan kerjasama antara satu aspek dengan aspek lainnya, untuk di jadikan pegangan bagi para pelaksana, agar proses pelaksanaannya dapat berjalan secara sistematis.

Menurut Hanim (2005:26) Organisasi berarti serangkaian aktifitas kolektif sekelompok yang diawali dengan peneliatian tujuan, pembagian kerja, dengan perincian tugas tertentu. Pendelegasian wewenang, pengawasan dan diakhiri dengan mengeluarkan tugas yang harus ada dalam setiap organisasi, organisasi bentuk apapun baik itu organisasi publik maupun privat.hal ini untuk mencapai tujuan organisasi dilengkapi dengan sumberdaya antara lain :

1. Man (manusia)
2. Money (uang)
3. Material (peralatan)

4. Metode (strategi)
5. Machine (mesin)
6. Market (Pasar) yang di sebut juga 6 M

Menurut Hasibuan (2006;2) manajemen adalah ilmu dan seni mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan tertentu. Sehingga dapat dijelaskan bahwa keterkaitan hubungan antara ketiga ilmu tersebut ialah dalam melaksanakan kerjasama tentunya dibutuhkan wadah atau tempat yaitu organisasi yang terdiri dari banyak bagian dan orang-orang serta sumber daya lainnya yang mana harus diolah sedemikian rupa agar penggunaan sumber daya tersebut dapat efektif dan efisien maka dibutuhkan manajemen yang memiliki fungsi perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan agar keseluruhan penggunaan sumber daya tersebut dan juga kegiatan dalam organisasi dapat berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

Bentuk organisasi tentunya terbagi menjadi 2 yaitu organisasi yang bersifat privat yaitu dengan tujuan keuntungan dan organisasi publik yaitu dengan tujuan kesejahteraan masyarakat. Negara Indonesia merupakan organisasi yang bersifat kenegaraan atau publik satu kesatuan yang terdiri dari masyarakat, pemerintah dan swasta dengan tujuan untuk mensejahterakan dan mencerdaskan bangsa, menjaga ketertiban dan keamanan dan keadilan sosial. Peran ketiganya yaitu pemerintah, masyarakat dan swasta dalam menjalankan suatu Negara sangat penting, Khususnya pemerintahan Indonesia sebagai institusi yang memiliki kekuasaan dalam mengatur kehidupan bernegara khususnya masyarakat.

Untuk mencapai suatu tujuan Negara dibentuk pemerintahan Pusat, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Kabupaten/ Kota dan Pemerintahan Desa yang mana dibutuhkan kerjasama dari berbagai pihak untuk mencapai tujuan tersebut.

Maka pemerintah sebagai instansi yang memiliki fungsi pengaturan dan pelayanan kesejahteraan masyarakat, dan juga pemberdayaan kehidupan masyarakat didalam suatu negara yang mana fungsi pemberdayaan tersebut dimiliki oleh pemerintahan meliputi seluruh aspek kehidupan.

Penyelenggaraan pemerintahan daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta pemerintah Kecamatan, Kelurahan hingga desa terhadap kesejahteraan masyarakat maka dari itu pemerintah daerah harus mampu melakukan peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekuasaan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tentunya dalam hal penyelenggaraan tugas daerah tersebut tidak akan berhasil tanpa kerjasama antar pemerintah daerah yaitu Kecamatan, Kelurahan hingga Desa yang mana bagian pemerintahan terkecil di daerah tetapi mempunyai peran yang sangat penting bagi pertumbuhan suatu daerah dikarenakan setiap daerah Kabupaten pasti terdiri dari desa-desa sehingga persaingan pemerintah desa sangatlah sentral dalam pembangunan daerah.

Desa menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 pasal I adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Salah satu kekhususan Desa adalah dapat membuat peraturan Desa yang disebut perdes, memiliki lembaga Legislatif yang disebut BPD. Pencapaian tujuan organisasi khususnya desa tidak akan tercapai tanpa pelaksanaan tugas dan fungsi

dari pemerintah desa dan juga kerjasama antar lembaga di Desa yaitu BPD, LKMD/LPMD, dan lembaga sosial lainnya. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, pemerintahan desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa. Dalam melaksanakan tugas harian dan pencapaian Visi dan Misi Desa. Kewenangan kepala desa dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa pada pasal 18 sampai dengan 19 yang mana kewenangan desa yaitu kewenangan dibidang penyelenggaraan pemerintah Desa dan pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat Desa. Adapun tugas kepala desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 pasal 26 :

- a. Kepala Desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan Desa, melaksanakan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
- b. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 1 Kepala Desa berwenang :
 1. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan Desa
 2. Mengangkat dan memberhentikan Perangkat Desa
 3. Memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan aset Desa
 4. Menetapkan peraturan Desa
 5. Menetapkan anggaran pendapatan dan belanja Desa
 6. Membina kehidupan masyarakat Desa
 7. Membina ketentraman dan ketertiban masyarakat Desa

8. Membina dan meningkatkan perekonomian Desa serta mengintegrasikan agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa.
9. Mengembangkan sumber pendapatan Desa
10. Mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa.
11. Mengembangkan kehidupan sosial dan budaya masyarakat Desa
12. Memanfaatkan teknologi tepat guna
13. Mengoordinasikan pembangunan Desa secara partisipatif
14. Mewakili Desa didalam dan diluar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dari penjelasan diatas dapat diketahui salah satu wewenang yang dimiliki oleh seorang Penghulu Kampung yaitu membina kehidupan masyarakat kampung, penghulu Kampung mempunyai wewenang bekerja sama dengan BAPEKAM dalam membuat peraturan Kampung yang berhubungan dengan pembinaan kehidupan masyarakat kampung. Dalam membina masyarakat serta mengembangkan kehidupan sosial dan budaya yang ada dikampung. Penghulu Kampung merupakan representasi pemerintah Kampung. Penghulu Kampung bukan kepanjangan tangan pemerintahan, melainkan sebagai pemimpin masyarakat. Penghulu Kampung harus melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat. Tugas Penghulu Kampung bukan sekedar menyelenggarakan pemerintahan Kampung, tetapi juga melakukan pemberdayaan kepada masyarakat kampung.

Lebih jelas peraturan yang telah mengatur tentang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa khususnya kewenangan desa dalam pembinaan yaitu Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pada pasal 34 ayat 1 huruf b dan c yaitu kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf a paling sedikit terdiri atas pembinaan kelembagaan masyarakat dan pembinaan lembaga dan hukum adat. Kemudian pasal 34 ayat 2 huruf f yang menyatakan Kewenangan lokal berskala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf b yaitu pembinaan kesehatan masyarakat dan pengelolaan pos pelayanan terpadu. Dari penjelasan tersebut dapat diketahui bahwa peran desa khususnya pemerintah desa yakni Kepala Desa menjadi hal yang penting dalam pembangunan desa khususnya pembinaan Kehidupan Desa pada beberapa aspek, Lembaga adat, lembaga hukum adat, pendidikan, kesehatan, budaya dan kehidupan sosial.

Pentingnya usaha pembinaan yang di lakukan oleh pemerintah desa khususnya Kepala Desa sebagai pemimpin dengan tujuan meningkatkan kemampuan masyarakat pada desa yang ia pimpin dengan cara memberikan bimbingan dan pendidikan menuju kondisi Desa kearah yang lebih baik. Tujuan pembinaan di desa tentunya memelihara hubungan antar lembaga di desa dan individu atau masyarakat desa kemudian dapat menyalurkan ide dan saran yang di miliki oleh masyarakat kepada kepala Desa untuk dapat meningkatkan kegiatan pembinaan masyarakat.

Dari penjelasan diatas bahwa kewenangan kepala desa dalam melakukan pembinaan mempunyai tujuan memberikan pengetahuan dalam rangka perbaikan

kondisi masyarakat Desa khususnya yang mana dalam pelaksanaan pembinaan secara keseluruhan kepala desa melakukan bimbingan kepada masyarakat serta pengawasan terhadap kegiatan pembinaan kehidupan masyarakat di Desa di mana kepala desa berwenang.

Khususnya di Kabupaten Siak penyebutan desa diubah menjadi kampung sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Perubahan Penamaan Desa Menjadi Kampung, Perubahan Penamaan Desa menjadi Kampung bertujuan untuk melestarikan penamaan lama yang pernah digunakan sebelum terbentuknya Kabupaten Siak. Kemudian perubahan nama bukan hanya pada kampung saja tetapi kepada pemimpin kampung dan perangkat kampung menurut pasal 1 perda Kabupaten Siak nomor 1 tahun 2015 Tentang Perubahan Penamaan Desa Menjadi Kampung yaitu:

1. Pemerintahan Kampung adalah penyelenggara urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintah Kampung adalah Penghulu dibantu perangkat Penghulu sebagai unsur penyelenggara pemerintahan kampung.
3. Penghulu adalah Kepala Kampung sebagai penyelenggara pemerintahan.
4. Badan Permusyawaratan Kampung yang selanjutnya disebut BAPEKAM adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Kampung berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
5. Perangkat Kampung adalah unsur pembantu Penghulu dalam melaksanakan tugas Pemerintah Kampung.

Pada dasarnya perubahan nama dari desa menjadi Kampung dengan tujuan untuk melestarikan penamaan lama dan dalam rangka menata kembali penamaan dalam bahasa melayu untuk Desa dengan sebutan Kampung di Kabupaten Siak, Terlebih lagi pada Kabupaten Siak terdapat Kampung adat yang mana menurut Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Kampung Adat di Kabupaten Siak Pada Pasal 1 Angka 10 Menyatakan Kampung Adat adalah susunan asli yang mempunyai hak asal usul berupa hak mengurus wilayah dan mengurus kehidupan masyarakat hukum adatnya. Untuk tercapainya penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat serta tidak melanggar adat-istiadat, Penghulu Kampung Adat mempunyai kewenangan sebagai berikut :

- a. pengaturan dan pelaksanaan Pemerintahan berdasarkan susunan asli;
- b. pengaturan dan pengurusan ulayat atau wilayah adat;
- c. pelestarian nilai sosial budaya kampung adat;
- d. penyelesaian sengketa adat berdasarkan hukum adat yang berlaku di kampung adat dalam wilayah yang selaras dengan prinsip hak asasi manusia dengan mengutamakan penyelesaian secara musyawarah;
- e. penyelenggaraan sidang perdamaian peradilan kampung adat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. pemeliharaan ketentraman dan ketertiban masyarakat desa adat berdasarkan hukum adat yang berlaku di kampung adat; dan
- g. pengembangan kehidupan hukum adat sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat kampung adat. Perda Kabupaten Siak Nomor 2 Tahun 2015 Pasal 6 Ayat 3

Tujuan ditetapkan nya Kampung Adat adalah untuk menghidupkan kembali peranan tokoh adat dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat, hal ini diakibatkan oleh semakin kompleksnya tata kehidupan dimasyarakat sebagai pengaruh urbanisasi penduduk dari daerah lain. Memberikan peran dan fungsi kepada Penghulu Kampung Adat dan tokoh adat untuk dapat mengayomi kehidupan masyarakat yang lebih optimal. (pasal 2 ayat2)

Kemudian menurut pasal 6 ayat 1 Kampung adat memiliki fungsi Pemerintahan, Keuangan, Pembangunan, serta mendapat fasilitasi dan pembinaan dari Pemerintah Kabupaten. Kampung adat pada dasarnya melakukan tugas yang hampir sama dengan Kampung, sedangkan perbedaannya hanyalah dalam pelaksanaan hak asal usul, terutama menyangkut kelestarian sosial, pengaturan dan pengurusan wilayah adat, sidang perdamaian adat, pemeliharaan ketentraman dan ketertiban bagi masyarakat hukum adat, serta pengaturan pelaksanaan pemerintahan berdasarkan susunan asli.

Salah satu Kampung adat yang ada di Kabupaten Siak yaitu Kampung adatyang ditetapkan menurut Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Penetapan Kampung Adat di Kabupaten Siak Pasal 3 huruf a ditetapkan ditetapkan menjadi Kampung Adat Lubuk Jering Kecamatan Sungai Mandau. Kampung Adat Lubuk Jering berada di wilayah administrasi Kabupaten Siak, dengan luas wilayah 7.000 ha, yang terdiri dari 2 (dua) dusun, 3(tiga) RK dan 7(tujuh) RT, tercatat 341 kepala keluarga, dengan jumlah perempuan sebanyak 676 jiwa dan jumlah laki- laki sebanyak 780 jiwa.

Sehingga dari jumlah masyarakat kampung yang cukup banyak tersebut Penghulu sebagai pemimpin kampung adat tentunya harus melaksanakan salah satu

kewenangan sebagai pemimpin kampung yaitu pelestarian nilai sosial dan budaya khususnya membina kehidupan kampung. Dalam membina kehidupan kampung mempunyai wewenang bekerja sama dengan Badan Permusyawaratan Kampung Adat yang selanjutnya disebut BAPEKAM dalam membuat peraturan Kampung dan Peraturan Penghulu yang berhubungan dengan pembinaan kehidupan masyarakat kampung adat. Maka dari itu peran Penghulu Kampung Lubuk Jering menjadi hal yang penting dalam pembangunan khususnya pembinaan kehidupan kampung.

Dari penjelasan di atas terlihat bahwa tugas Penghulu dalam melakukan pembinaan mempunyai tujuan memberikan pengetahuan dalam rangka perbaikan kondisi masyarakat Kampung khususnya masyarakat Kampung Adat Lubuk Jering yang mana dalam pelaksanaan pembinaan secara keseluruhan Penghulu melakukan bimbingan kepada masyarakat serta pengawasan terhadap kegiatan pembinaan kehidupan masyarakat di Kampung dimana Penghulu berwenang. Salah satu bentuk kehidupan masyarakat desa atau Kampung adalah aspek aspek Sosial dan budaya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel I. 1. Kondisi Kehidupan Sosial dan Budaya Kampung Adat Lubuk Jering

No	Uraian Status	Jumlah
1.	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan, perempuan dan Pemuda	2
2.	Jumlah Anggota Organisasi sosial dan kemasyarakatan yang aktif	56
3.	Kegiatan Bakti/gotong royong	2
4.	Kegiatan Pembinaan Kesenian dan Sosial Budaya	3

Sumber: Kantor Penghulu Kampung Adat Lubuk Jering, 2019

Dari data di atas terlihat masih kurangnya kegiatan pembangunan yang dilakukan di Kampung Adat Lubuk Jering, kurangnya partisipasi masyarakat dalam

kegiatan lembaga kemasyarakatan seperti LPMK dan karang taruna dan organisasi adat lainnya serta pengadaan acara kebudayaan yang berjumlah sedikit untuk melestarikan kebudayaan kampung Sehingga dari seluruh penjelasan aspek kehidupan masyarakat kampung diperlukan pembinaan dari Penghulu Kampung Adat Lubuk Jering maka dari itu apabila pembinaan kehidupan masyarakat kampung dilakukan dengan baik maka kehidupan masyarakat kampung akan menjadi semakin baik, maju serta dapat melestarikan adat istiadat. Maka untuk meningkatkan kegiatan dibidang sosial dan budaya Pemerintah Kampung Adat Lubuk Jering menganggarkan sebesar Rp. 84.500.000,- melalui Keputusan Kepala Kampung PERKAM NO. 3 tahun 2019 tentang Persetujuan Bersama BAPEKAM Mengenai Anggaran kegiatan sosial dan budaya dengan rincian kegiatan sebagai berikut:

1. Kegiatan Pembinaan Pemuda
Kegiatan Pembinaan Pemuda dan Olahraga pada tahun 2019 dianggarkan sebesar Rp.31.000.000,-
2. Kegiatan Pembinaan Organisasi Perempuan/PKK
Kegiatan Pembinaan Organisasi Perempuan/PKK pada tahun 2019 ini dialokasikan sebesar Rp.18.500.000,-
3. Kegiatan Pembinaan Kesenian dan Sosial Budaya
Kegiatan Pembinaan Kesenian dan Sosial Budaya pada tahun 2019 ini dialokasikan sebesar Rp.20.000.000,-
4. Kegiatan Peningkatan Kapasitas Lembaga Masyarakat
Kegiatan Peningkatan Kapasitas Lembaga Masyarakat pada tahun 2019 ini dialokasikan sebesar Rp.10.000.000,-
5. Kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat
Kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat pada tahun 2019 ini dialokasikan sebesar Rp.5.000.000,-

Dari data diatas mengenai anggaran khususnya kegiatan pembinaan masyarakat cukup besar tetapi dari data yang didapatkan untuk kegiatannya masih tergolong kecil, terlihat masih kurangnya kegiatan pembinaan yang dilakukan di Kampung Adat Lubuk Jering, kurangnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan rapat Desa, kurangnya pengadaan acara kebudayaan untuk melestarikan kebudayaan untuk

melestarikan kebudayaan Kampung, sehingga dari seluruh penjelasan aspek kehidupan masyarakat Kampung Khususnya Sosial budaya diperlukan pembinaan dan kewenangan dari kepala Penghulu Kampung Adat Lubuk Jering. Maka dari itu apabila pembinaan kehidupan masyarakat Kampung dilakukan dengan baik maka kehidupan masyarakat kampung akan menjadi semakin baik, maju serta dapat melestarikan adat istiadat. Dari penjelasan diatas terlihat masih adanya masalah dalam pelaksanaan kewenangan Penghulu Kampung dalam membina kehidupan masyarakat Kampung Adat Lubuk Jering, sehingga dapat di kongretkan fenomena yang masih terjadi meliputi :

1. Bahwa Penghulu Kampung kurang Efektif memberikan bimbingan dan pembinaan terhadap masyarakat kampung sehingga masih rendahnya respon masyarakat kampung dalam pembinaan dan bimbingan yang dilakukan Penghulu Kampung terhadap kehidupan masyarakat Kampung.
2. Belum terciptanya kerja sama yang baik antara Penghulu Kampung dengan lembaga pemasyarakatan Kampung seperti Karang Taruna, Lembaga Adat, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat kampung dan lembaga Perempuan, sehingga Penghulu Kampung tidak efektif dalam melakukan pengadaan acara adat/kebudayaan dalam pelestarian kebudayaan masyarakat Kampung.
3. Kurangnya pengawasan yang dilakukan oleh Penghulu Kampung terhadap kehidupan masyarakat Kampung Adat Lubuk Jering yang masih membutuhkan bimbingan dari pemerintahan Kampung.

Dari latar belakang yang telah diuraikan dan permasalahan yang dikemukakan pada fenomena diatas terlihat masih kurangnya pelaksanaan kewenangan Penghulu

Kampung dalam membina kehidupan masyarakat Kampung Lubuk Jering khususnya Sosial budaya dan masih adanya masyarakat yang memerlukan bimbingan dari pemerintahan Kampung khususnya dari Penghulu Kampung, sehingga dari latar belakang fenomena tersebut peneliti ingin menilai pelaksanaan dan melakukan penelitian mengenai kewenangan Penghulu Kampung, dengan judul **“Analisis Pelaksanaan kewenangan Penghulu Kampung Dalam Membina Kehidupan Sosial Budaya Masyarakat di Kampung Adat Lubuk Jering Kecamatan Sungai Mandau Kabupaten Siak”**

B. Rumusan Masalah

Dari permasalahan yang telah dikemukakan diatas mengenai masih belum maksimalnya baiknya pelaksanaan kewenangan Penhulu Kampung Adat Lubuk Jering dalam membina kehidupan Sosial Budaya masyarakat Kampung Adat Lubuk Jering, maka dapat dirumuskan permasalahan penelitian ini adalah sebagai berikut **“Bagaimana Pelaksanaan kewenangan Penghulu Kampung dalam Membina Kehidupan Sosial Budaya Masyarakat di Kampung Adat Lubuk Jering Kecamatan Sungai Mandau Kabupaten Siak”**

C. Tujuan dan kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui Hasil pelaksanaankewenangan Penghulu Kampung dalam Membina Kehidupan Sosial Budaya Masyarakat di Kampung Adat Lubuk Jering Kecamatan Sungai Mandau Kabupaten Siak.
- b. Untuk mengetahui hambatan-hambatan pelaksanaan kewenangan Penghulu Kampung dalam Membina Kehidupan Sosial Budaya

Masyarakat di Kampung Adat Lubuk Jering Kecamatan Sungai Mandau Kabupaten Siak.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Kegunaan Teoritis : Untuk mengetahui ilmu pengetahuan khususnya mengenai Pelaksanaan kewenangan Penghulu Kampung dalam Membina Kehidupan Sosial Budaya Masyarakat di Kampung Adat Lubuk Jering Kecamatan Sungai Mandau Kabupaten Siak.
- b. Kegunaan Praktis : Untuk memberikan rekomendasi, solusi, dan sumbangan tentang pelaksanaan kewenangan Penghulu Kampung dalam Membina Kehidupan Sosial Budaya Masyarakat di Kampung Adat Lubuk Jering Kecamatan Sungai Mandau Kabupaten Siak.
- c. Kegunaan Akademis : Sebagai bahan masukan bagi rekan-rekan mahasiswa yang ingin meneliti lebih lanjut mengenai kewenangan Penghulu Kampung dalam Membina Kehidupan Sosial Budaya Masyarakat di Kampung Adat Lubuk Jering Kecamatan Sungai Mandau Kabupaten Siak.

BAB II

STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA BERPIKIR

A. Studi Kepustakaan

1. Konsep Administrasi

Konsep Administrasi di lihat dari segi etimologi berasal dari Bahasa Inggris yaitu administration atau to administer yang berarti mengelola (to manage) atau menggerakkan (to direct). Kemudian di jelaskan oleh Dunsire (dalam Kusdi, 2017:7) asal kata administrasi adalah bahasa latin, administrare, yaitu gabungan ad (to) + ministrare (serve). Kata ini selanjutnya membentuk kata administratio yang berarti cara membantu atau memberi bantuan. Selanjutnya pembagian administrasi dibagi menjadi 2 (dua) yaitu dalam arti sempit dan luas. Pertama, Administrasi dalam arti sempit yaitu kegiatan tata usaha seperti tulis menulis, surat menyurat.

Senada yang di jelaskan oleh Syafiie (2003;3) Administrasi dalam arti sempit adalah berupa kegiatan pencatatan, pengelolaan, pengadaan, penyimpanan (pengarsipan), pengiriman, berbagai informasi yang diterima atau yang dikeluarkan oleh suatu organisasi / institusi.

Selanjutnya Menurut Reksohadiprawiro (dalam Widjaja, 2003: 37) administrasi adalah usaha yang mencakup setiap pengaturan yang rapi dan sistematis serta penentuan fakta-fakta secara tertulis dengan tujuan memperoleh pandangan yang menyeluruh serta hubungan timbal balik antara satu fakta dengan fakta lainnya. Masih dalam lingkup sempit menurut Zulkifli (2005:16-17) bahwa konsep administrasi diidentikkan dengan berbagai bentuk keterangan terangan tertulis, dalam studi administrasi dikonsepsikan sebagai administrasi dalam arti sempit. Pada konteks ini administrasi diartikan sebagai rangkaian pekerjaan ketatausahaan atau

keseekretariatan yang terkait dengan surat-menyurat (korespondensi) dan pengelolaan keterangan tertulis lainnya.

Administrasi dalam arti luas juga diartikan sebagai petunjuk bagi seorang dalam memimpin dan mengontrol dari suatu kelompok atau individu untuk mencapai sejumlah tujuan. Atmosudirjo (dalam Zulkifli, 2005: 17) menyatakan bahwa administrasi merupakan seperangkat kegiatan tertentu dan terarah yang berlangsung untuk memimpin serta mengendalikan organisasi modern yang menjadi wahana suatu urusan sekaligus berlangsung didalamnya.

Menurut Siagian (2003: 2) mengemukakan bahwa administrasi adalah keseluruhan proses kerja sama antara dua orang atau lebih yang didasari atas rasionalitas tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Selanjutnya administrasi menurut Silalahi (2003: 11) yaitu kegiatan kerja sama yang dilakukan sekelompok orang berdasarkan pembagian kerja sebagaimana ditentukan dalam struktur dengan mendayagunakan sumberdaya-sumberdaya untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien.

Dari uraian diatas dapat dipahami bahwa yang menjadi bahan baku administrasi ialah manusia. Karena manusia merupakan sumber daya yang terpenting dalam administrasi, khususnya keberadaanya sebagai makhluk sosial yang bermasyarakat. Konsekuensinya ialah administrasi bertanggung jawab terhadap kelangsungan organisasi dengan segala kegiatan mulai merencanakan sampai pada evaluasi demi tujuan yang telah ditentukan sebelumnya secara efisien dan efektif.

Maka jika dilihat pada penjelasan diatas administrasi adalah kerjasama antara dua orang atau lebih untuk mencapai tujuan bersama. Kemudian administrasi negara menurut Mustopadidjaja (2003:9) Administrasi Negara adalah merupakan semua

kegiatan dan tindakan dilakukan untuk mengatur urusan-urusan negara yang menyangkut kepentingan negara yang bersangkutan. Dalam sebuah administrasi terdapat prinsip-prinsip yang diyakini sebagai pegangan atau acuan yang sebagai pendukung dalam upaya pencapaian tujuan atau hasil yang diharapkan. Dalam konteks administrasi publik tujuan bersama adalah tujuan Negara. Sebagaimana konsep administrasi adalah bekerja melalui organisasi sebagai tempat bekerjasama yang diikat dalam peraturan organisasi menurut pembagian tugas sehingga dapat mencapai tujuan organisasi.

2. Konsep Organisasi

Organisasi merupakan lokus dimana administrasi hidup, berjalan dan berkembang, maka dari itu sudah pasti setiap organisasi baik swasta maupun publik harus melakukan administrasi untuk emncapai tujuannya. Hal serupa dijelaskan oleh Winardi(2009:1) organisasi merupakan elemen yang amat diperlukan didalam kehidupan manusia (apalagi didalam kehidupan modern) organisasi membantu kita melaksanakan hal-hal atau kehggiatan-kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan dengan baik sebagai individu. Disamping itu dapat dikatakan lagi bahwa organisasi-organisasimembantu masyarakat, membantu kelangsungan pengetahuan dan ilmu pengetahuan. Ia pun merupakan sumber penting aneka macam karir di dalam masyarakat.

Menurut Manulang (dalam Hasibuan, 2009:24) organisasi dalam arti dinamis adalah suatu proses penetapan dan pembagian pekerjaan yang akan dilakukan penetapan tugas-tugas atau tanggungjawab serta wewenang dan hubungan antara unsur-unsur organisasi sehingga memungkinkan orang-orang dapat bekerjasama seefektif mungkin untuk pencapaian tujuan.

Menurut Hamim (2005:24) organisasi adalah proses penggabungan pekerjaan yang para individu atau kelompok-kelompok harus melakukan dengan bakat-bakat yang diperlukan untuk menyelesaikan tugas-tugas sedemikian rupa memberikan saluran terbaik untuk pemakaian efisiensi, sistematis, positif dari usaha yang tersedia untuk mencapai tujuan organisasi yang ditetapkan.

Setiap organisasi harus menerapkan prinsip-prinsip sebagai acuan dalam melaksanakan setiap fungsi, tugas dan wewenang dan tanggungjawab seperti yang dirumuskan oleh Atmosudirjo (dalam Zulkifli,2005:75) sebagai berikut :

- a. Organisasi itu harus mempunyai tujuan
- b. Harus ada pembagian kerja dan penugasan kerja yang homogeny
- c. Antara tugas, tanggungjawab, dan kekuasaan harus dilakukan secepatnya.
- d. Setiap pelimpahan kekuasaan dan tugas harus dilakukan setepatnya
- e. Kesatuan komando dan Hirarki
- f. Komunikasi
- g. Kewajiban pimpinan untuk mengadakan pengecekan terhadap tugasnya
- h. Kontunuitas
- i. Saling asuh antara instansi lini dan staf
- j. Koordinasi
- k. Kehayatan

Selanjutnya menurut hubungan kerja H.Schein (dalam Marnis,2013:132) menyatakan Organisasi adalah koordinasi sejumlah kegiatan manusia yang direncanakan untuk mencapai suatu tujuan bersama melalui pembagian dan fungsi, serta melalui serangkaian wewenang dan tanggungjawab. Berdasarkan penjelasan diatas bahwa organisasi mempunyai hubungan-hubungan wewenang, kekuasaan, akuntabilitas, dan tanggungjawab. Organisasi adalah proses penggabungan pekerjaan yang para individu atau kelompok-kelompok harus melakukan dengan bakat-bakat yang dipergunakan untuk menyelesaikan tugas-tugas sedemikian rupa, memberi saluran terbaik untuk pemakaian efisiensi, sistematis, positif dari usaha yang tersedia untuk mencapai tujuan organisasi yang ditetapkan.

3. Konsep Manajemen

Manajemen merupakan sarana untuk mengelola seluruh sumber daya organisasi, yaitu, manusia, uang, peralatan, mesin, metode dan market dengan fungsi-fungsi manajemen, yang dijelaskan oleh Terry (dalam Siswanto,2013:18) mendeskripsikan bahwa fungsi-fungsi manajemen yang lebih dikenal dengan POAC terdiri dari Perencanaan (Planning), Pengorganisasian (organizing), Penggerakan (actuating) dan Pengendalian (Controlling).

Menurut ilmunya Froderik (dalam Hayat 2017:10) Manajemen merupakan ilmu pengetahuan yang mandiri yang sebenarnya akan dikerjakan, selanjutnya mengkaji apakah sesuatu itu dikerjakan dengan cara terbaik serta termudah. Kemudian dari sudut pandang manajemen terbagi menjadi 2 (dua) yaitu sebagai proses penyelenggara berbagai kegiatan dalam rangka penerapan tujuan dan sebagai kemampuan atau keterampilan orang yang menduduki jabatan material untuk memperoleh sesuatu hasil dalam rangka pencapaian tujuan melalui kegiatan-kegiatan orang lain. Siagian (2011:5)

Dari segi proses Winardi (dalam sitorus, 2009 : 2) mengemukakan Manajemen adalah merupakan sebuah proses khusus, yang terdiri dari kegiatan-kegiatan perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan tindakan pengawasan yang dilaksanakan untuk mendeterminasi dan mencapai sasaran-sasaran yang ditetapkan sebelumnya, dengan jalan memanfaatkan unsur manusia dan sumberdaya lainnya.

Menurut Terry (dalam Hasibuan 2010:2) Manajemen adalah suatu proses yang khas yang terdiri dari tindakan-tindakan perencanaan, pengorganisasian, pengerahan dan pengendalian yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai

sasaran-sasaran yang telah ditentukan melalui pemanfaatan sumberdaya manusia dan sumber-sumber lainnya.

Berdasarkan penjelasan diatas bahwa manajemen adalah pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya secara efektif dan efesien untuk mencapai tujuan tertentu dikaitkan dengan aktifitas-aktifitas, perencanaan, pengorganisasian, pengendalian, penempatan, pengarahan, pemotivasian, komunikasi, dan pengambilan keputusan yang dilakukan oleh setiap organisasi dengan tujuan untuk mengkoordinasikan berbagai sumber daya yang memiliki oleh perusahaan sehingga menghasilkan jasa yang efisien.

4. Konsep kewenangan

Menurut kamus besar bahasa indonesia (dalam Hidjaz, 2010: 35) kata wewenang disamakan dengan katakewenangan, yang diartikan sebagai hak dan kekuasaan untuk bertindak,kekuasaan membuat keputusan,memerintah dan melimpahkan tanggung jawabkepada orang/badan lain

Wewenang merupakan kekuasaan untuk melakukan semua tindakan hukum publik. Jadi kewenangan merupakan kekuasaan terhadap segolongan orang tertentu atau kekuasaan terhadap suatu bidang pemerintahan yang berlandaskan peraturan perundang-undangan. Agar tidak terjadi kesewenang-wenangan, kewenangan yang dimiliki harus berlandaskan hukum yang sah. Wewenang adalah kekuasaan untuk melakukan suatu tindakan hukum publik. Keseluruhan pelaksanaan wewenang pemerintah dijalankan oleh organisasi pemerintah. Tanpa adanya wewenang pemerintah, maka tidak akan melahirkan keputusan yang sah, sehingga wewenang tersebut mengandung cacat hukum. Nugrafa (2007:29-33)

Menurut Syafrudin (2000:22) ada perbedaan antara pengertian kewenangan dengan wewenang, kewenangan adalah apa yang disebut kekuasaan formal, kekuasaan yang berasal dari kekuasaan yang diberikan oleh Undang-Undang, sedangkan wewenang hanya mengenai suatu bagian tertentu saja dari kewenangan.

Kemudian Stoud (dalam Irfan, 2004: 4) kewenangan dapat dijelaskan sebagai keseluruhan aturan-aturan yang berkenaan dengan perolehan dan penggunaan wewenang perintah yang diberikan oleh subjek hukum publik. maka dari pengertian dan teori diatas dapat disimpulkan bahwa kewewenangaan merupakan kebebasan dalam melakukan atau tidak melakukan tindakan tertentu yang mana segala sesuatu tindakan yang dilakukan ataupun tidak dilakukan harus berdasarkan peraturan yang ada.

Philipus M. Hadjon (dalam Ridwan, 2013: 108) mengatakan bahwa setiap tindakan pemerintahan disyaratkan harus bertumpu atas kewenangan yang sah. Kewenangan itu diperoleh melalui tiga sumber, yaitu atribusi, delegasi, dan mandat. Kewenangan atribusi lazimnya digariskan melalui pembagian kekuasaan negara oleh undang-undang dasar, sedangkan kewenangan delegasi dan mandat adalah kewenangan yang berasal dari pelimpahan.

Sebelum menjalankan tugasnya, setiap pejabat administrasi negara harus terlebih dahulu dilekatkan dengan suatu kewenangan yang sah berdasarkan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, sumber wewenang pemerintah terdapat dalam peraturan perundang-undangan. Untuk menghindari abuse of power, semua kekuasaan harus dibatasi oleh hukum atau peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan definisi kewenangan menurut para ahli diatas, penulis berpendapat bahwa kewenangan merupakan suatu hak yang dimiliki oleh seorang

pejabat atau institusi yang bertindak menjalankan kewenangannya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5. Konsep Pembinaan

Pembinaan merupakan proses, cara membina dan penyempurnaan atau usaha tindakan dan kegiatan yang dilakukan untuk memperoleh hasil yang lebih baik. Pembinaan pada dasarnya merupakan aktivitas atau kegiatan yang dilakukan secara sadar, berencana, terarah, dan teratur secara bertanggung jawab dalam rangka penumbuhan, peningkatan dan mengembangkan kemampuan serta sumber-sumber yang tersedia untuk mencapai tujuan. Pembinaan adalah upaya pendidikan formal maupun non formal yang dilakukan secara sadar, berencana, terarah, teratur, dan bertanggung jawab dalam rangka memperkenalkan, menumbuhkan, membimbing, dan mengembangkan suatu dasar-dasar kepribadiannya seimbang, utuh dan selaras, pengetahuan dan keterampilan sesuai dengan bakat, kecenderungan/keinginan serta kemampuan-kemampuannya sebagai bekal, untuk selanjutnya atas perkasa sendiri menambah, meningkatkan dan mengembangkan dirinya, sesamanya maupun lingkungannya ke arah tercapainya martabat, mutu dan kemampuan manusiawi yang optimal dan pribadi yang mandiri. Simanjuntak (1990:84)

Pembinaan sebagai suatu konsep yang selalu dipakai untuk memacu pertumbuhan pembangunan diberbagai sektor selalu mendapat perhatian dari pemerintah. Hal ini tentu disebabkan karena pemerintah bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan pembangunan sementara pembangunan akan berhasil bila masyarakat tahu dan mengerti apa yang seharusnya ia lakukan sebagai bagian dari penggerak pembangunan. Pembinaan Menurut Efendi (2003:24) adalah pendidikan dalam rangka perbaikan dan perbaharuan suatu kondisi pada orang perorangan,

kelompok maupun dalam aspek bidang kehidupan tertentu secara langsung termasuk di dalamnya bidang ekonomi, bidang sosial budaya dan bidang politik, sehingga dengan mulai pendidikan itu dapat mencapai titik maksimal.

Apalagi jika dilihat dari birokrasi pemerintahan sekarang yang sedang berjalan, pemerintahan daerah dituntut untuk manata kembali format organisasi pemerintahan dan aktifitasnya. Selama ini pemerintahan yang dijalankan belum terlaksana secara maksimal, hal ini karena kinerja aparat yang masih lemah. Pembinaan sebagai suatu konsep yang selalu dipakai untuk memacu pertumbuhan pembangunan diberbagai sektor selalu mendapat perhatian dari pemerintah. Hal ini tentu disebabkan karena pemerintahan bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan pembangunan sementara pembangunan akan berhasil apabila masyarakat tahu dan mengerti apa yang seharusnya ia lakukan sebagai bagian dari penggerak pembangunan.

Sementara itu Ndraha (2003:166) mengatakan istilah pembinaan menunjukkan antara lain, pengarahan pengaturan, dan pengisian bahwa pembinaan lembaga masyarakat berarti usaha-usaha yang dapat dilakukan dalam rangka penataan kembali agar pranata atau lembaga masyarakat, pengarahan tingkah laku masyarakat dan pengisian mental anggota masyarakat dengan budaya nasional.

Menurut Thoha (2008:207) Pembinaan adalah suatu tindakan, proses, hasil atau pernyataan lebih baik. Dalam hal ini menunjukkan kemajuan, peningkatan dari pertumbuhan suatu organisasi dengan menggabungkan kata tersebut. Lebih lengkap Musanef (2000: 47) menjelaskan bahwa pembinaan adalah segala usaha tindakan yang berhubungan langsung dengan perencanaan, penyusunan, pembangunan, pengembangan, pengarahan, penggunaan, serta pengendalian segala suatu secara

berdaya guna dan berhasil guna. pembinaan merupakan tugas yang terus menerus di dalam pengambilan keputusan yang berwujud suatu perintah, peraturan, atau instruksi-intruksi sehingga yang dibina dapat melaksanakan tugasnya dan akhirnya dapat didayagunakan secara tepat dan berhasil guna bagi suatu organisasi atau lembaga.

Selanjutnya menurut Manullang (2009:11) pembinaan adalah usaha memberi bimbingan, saran, perintah-perintah atau instruksi kepada bawahan dalam melaksanakan tugas masing-masing, agar tugas dapat dilaksanakan dengan baik dan benar-benar tertuju pada tujuan yang telah ditetapkan semula.

Pembinaan merupakan tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara berdaya guna berhasil guna untuk memperoleh hasil yang lebih baik. Secara umum pembinaan disebut sebagai sebuah perbaikan terhadap pola kehidupan yang direncanakan. Setiap manusia memiliki tujuan hidup tertentu dan ia memiliki keinginan untuk mewujudkan tujuan tersebut. Apabila tujuan hidup tersebut tidak tercapai maka manusia akan berusaha untuk menata ulang pola kehidupannya

Pembinaan dalam bentuk pendidikan dan pelatihan serta pemberian informasi kepada masyarakat oleh pemerintah Desa dalam rangka perbaikan dan perbaharuan suatu kondisi pada suatu wilayah kelompok maupun dalam aspek bidang kehidupan tertentu secara langsung termasuk didalamnya bidang ekonomi, bidang sosial budaya dan bidang politik, sehingga dengan mulai pendidikan itu dapat mencapai titik maksimal, dari pelaksanaan tugas tersbut dapat diketahui bahwa pembinaan meliputi, Perencanaan, bimbingan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan:

1. Perencanaan

Robbins dan Coulter (dalam Ernie Tisnawati, 2008:96) mendefinisikan perencanaan sebagai sebuah proses yang dimulai dari penetapan tujuan organisasi, menentukan strategi untuk pencapaian tujuan organisasi tersebut secara menyeluruh, serta merumuskan sistem perencanaan yang menyeluruh untuk mengintegrasikan dan mengoordinasikan seluruh pekerjaan organisasi hingga tercapainya tujuan organisasi.

2. Bimbingan

Bimbingan atau pengarahan menurut Hasibuan (2006: 184) adalah kegiatan yang dilakukan pimpinan untuk membimbing, menggerakkan, mengatur segala kegiatan yang telah di beri tugas dalam melaksanakan sesuatu kegiatan usaha. Dalam hal ini bimbingan dilakukan oleh kepala desa dalam membina kehidupan masyarakat desa dengan cara persuasif atau bujukan dan intruktif tergantung cara yang mana yang paling efektif.

3. Pengawasan

Merupakan fungsi seorang pemimpin yaitu Penghulu kampung yang merupakan usaha untuk menjaga suatu kegiatan tetap berjalan dengan semestinya. Brantas (2006: 188) Fungsi pengawasan (controlling) adalah fungsi terakhir dari proses manajemen. Fungsi ini sangat penting dan sangat menentukan pelaksanaan proses manajemen, karena itu harus dilakukan dengan sebaik-baiknya. Pengawasan ialah proses pemantauan, penilaian, dan pelaporan rencana atas pencapaian tujuan yang telahditetapkan untuk tindakan korektif gunapenyempurnaan lebih lanjut.

4. Evaluasi

Siagian (2002: 174) Evaluasi (penilaian) merupakan kegiatan sadar untuk membandingkan hasil yang seharusnya dicapai dan yang menurut kenyataan dicapai. Selanjutnya Evaluasi atau penilaian menurut Zulkifli (2005: 227) merupakan suatu proses analisis data yang diperoleh untuk menentukan hasil faktual dari pelaksanaan pengawasan itu. Instrumen yang digunakan dalam proses penilaian dapat menggunakan instrument pengawasan. Jika demikian halnya perbedaan mendasar antara pengawasan dan penilaian terletak pada aspek orientasi waktu, sasaran dan pemanfaatannya. (Zulkifli, 2005; 227).

Sehingga dapat diambil kesimpulan pelaporan adalah suatu usaha seorang pemimpin memberikan pertanggung jawaban pekerjaan atau kegiatan yang telah dilakukan dengan menggunakan komunikasi lisan dan tulisan kepada bawahan atau masyarakat.

6. Konsep Desa dan Kehidupan Masyarakat Desa

Departemen Dalam Negeri (dalam Wasistiono dan Tahrir, 2006: 8) meninjau pengertian Desa kembali, yaitu desa atau dengan nama aslinya yang setingkat yang merupakan kesatuan masyarakat susunan asli adalah suatu “badan hukum’ dan ada pula badan pemerintahan” yang merupakan bagian dari wilayah kecamatan atau wilayah yang melingkunginya.

Selanjutnya Sunardjo (dalam Wasistiono dan Tahrir, 2006: 9) menjelaskan Desa adalah kesatuan masyarakat hukum berdasarkan ada dan hukum adat yang menetap dalam suatu wilayah tertentu batas-batasnya. Masyarakat adalah kumpulan individu yang memiliki tujuan yang sama dan menempati suatu daerah dan juga mempunyai hubungan baik antara sesamanya, pada umumnya kehidupan masyarakat

desa meliputi aspek kesehatan, pendidikan dan sosial budaya yang mana keseluruhan aspek tersebut harus di jaga dan ditingkatkan sehingga masyarakat mendapat kehidupan yang lebih layak dan baik.

Sebagai contoh pembinaan kehidupan masyarakat bidang kesehatan yaitu pendirian posyandu dan pemeriksaan rutin masyarakat desa yang dilakukan oleh pemerintah, pembangunan sarana dan prasana pendidikan di desa serta pelestarian sosial budaya yang dimiliki oleh masyarakat setempat, maka dari itu pemerintah Desa khususnya Kepala desa mempunyai kewenangan membina kehidupan masyarakat desa dengan melakukan pengarahan, mengatur, menilai kegiatan dan melakukan laporan pertanggung jawaban kegiatan tersebut kepada masyarakat desa dan pemerintah Kecamatan serta kabupaten.

B. Kerangka Pikir

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya serta Kemudian di ukur dengan teori yang dijadikan indikator serta fenomena yang terjadi, maka peneliti menjelaskan hubungan unsur-unsur dalam penelitian ini ke dalam gambaran alur penelitian yang dapat dilihat pada gambar dibawah ini:

Gambar II.I Kerangka Pemikiran Analisis Pelaksanaan kewenangan Penghulu Kampung dalam Membina Kehidupan Sosial Budaya Masyarakat di Kampung Adat Lubuk Jering Kecamatan Sungai Mandau Kabupaten Siak



Sumber: Modifikasi penulis, 2019

C. Konsep Operasional

Untuk menghilangkan serta menghindari dari kesalah pahaman beberapa konsep atau pun istilah yang digunakan dalam penelitian ini, maka perlu dijelaskan dalam konsep operasional sebagai berikut :

1. Pembinaan adalah usaha memberi bimbingan, saran, perintah-perintah atau instruksi kepada bawahan dalam melaksanakan tugas masing-masing, agar tugas dapat dilaksanakan dengan baik dan benar-benar tertuju pada tujuan yang telah ditetapkan semula.

2. Kehidupan masyarakat Desa adalah beberapa bidang kehidupan yang dimiliki oleh masyarakat di desa meliputi, pendidikan, kesehatan dan sosial budaya.
3. Kehidupan sosial budaya masyarakat desa ialah kondisi masyarakat kampung dalam bidang sosial dan kehidupan beragama dan budaya yang berlaku di kampung.
4. Membina kehidupan masyarakat adalah pendidikan dan pelatihan serta pemberian informasi kepada masyarakat oleh pemerintah Desa pada bidang kehidupan tertentu secara langsung.
5. Perencanaan ialah sebagai sebuah proses yang dimulai dari penetapan tujuan organisasi, menentukan strategi untuk pencapaian tujuan organisasi tersebut secara menyeluruh, serta merumuskan sistem perencanaan yang menyeluruh untuk mengintegrasikan dan mengoordinasikan seluruh pekerjaan organisasi hingga tercapainya tujuan organisasi
6. Bimbingan adalah usaha seorang pemimpin yaitu penghulu kampung dalam mengatur sebuah kegiatan yang mana mengacu kepada peraturan-peraturan yang berlaku, mengenai kehidupan masyarakat kampung dengan melakukan pengarahan dan intruksi kepada pemerintah kampung serta lembaga kampung.
7. Pengawasan adalah usaha yang dilakukan pemimpin dalam hal ini penghulu kampung menertibkan suatu kegiatan agar berjalan dengan sebagai mana mestinya.
8. Evaluasi adalah usaha untuk menilai suatu kegiatan yang di lakukan dengan tujuan sampai dimana tingkat keberhasilan kegiatan tersebut,

evaluasi dalam penelitian ini dilakukan setelah kegiatan tersebut dilaksanakan untuk mengetahui hasil dari pembinaan masyarakat

9. Pelaporan adalah suatu usaha dan kegiatan untuk mempertanggung jawabkan hasil dari kegiatan yang dilaksanakan, dalam penelitian ini pelaporan yaitu tindakan yang dilakukan penghulu kampung dalam mempertanggungjawabkan kegiatan pembinaan kehidupan masyarakat bersama dengan lembaga lainnya kepada masyarakat.

D. Operasional Variabel

Operasional variabel dibuat untuk mempermudah penelitian dan pembaca dalam memahami arah dan tujuan dari penelitian ini, maka penulis menganggap perlu menjelaskan sebuah Operasional Variabel dalam bentuk tabel dan di bagi menjadi indikator serta item penelitian, pembagian operasional variabel ini dimaksudkan agar adanya alur dan teori-teori yang jelas di dalam penelitian ini. Adapun Operasional Variabel yang penulis maksud di buat menjadi sebuah tabel dengan tujuan mempermudah dalam pembagian antara konsep, indikator, item dan skala, untuk lebih jelasnya seperti pada tabel berikut ini:

Tabel. II.1: Operasional Variabel Penelitian Analisis Pelaksanaan kewenangan Penghulu Kampung dalam Membina Kehidupan Sosial Budaya Masyarakat di Kampung Adat Lubuk Jering Kecamatan Sungai Mandau Kabupaten Siak

Konsep	Variabel	Indikator	Item Penilaian	Skala
Musanef (2000: 47) menjelaskan bahwa pembinaan adalah segala usaha tindakan yang berhubungan langsung dengan perencanaan,	Membina kehidupan masyarakat Desa	1. Perencanaan	a. menyusun rencana b. menetapkan strategi c. koordinasi antar lembaga	Ordinal Ordinal

penyusunan, pembangunan, pengembangan, pengarahannya, penggunaan, serta pengendalian segala suatu secara berdaya guna dan berhasil guna.	2. Bimbingan	a. membimbing b. menggerakkan	Ordinal
	3. Pengawasan	b. Memberikan Intruksi	
	4. Evaluasi	a. Pemantauan b. Mengatur c. Memperbaiki kegiatan	Ordinal
		a. Membandingkan hasil b. Penilaian c. Pelaporan	

Sumber: Modifikasi Peneliti, 2019.

E. Teknik Pengukuran

Teknik pengukuran dalam penelitian ini di buat untuk melakukan pembatasan mengenai hasil penelitian Pelaksanaan kewenangan Penghulu Kampung dalam Membina Kehidupan Sosial Budaya Masyarakat di Kampung Adat Lubuk Jering Kecamatan Sungai Mandau Kabupaten Siak dan pengolahan data yang mana di batasi dalam bentuk persentase dan kategori terlaksana, cukup terlaksana dan kurang terlaksana yang mana agar ada ukuran tertentu dari keberhasilan atau kegagalan dalam tindakan yang dilakukan dan dari hal itu dapat mengetahui sejauh mana dan bagaimana kewenangan Penghulu Kampung dalam Membina Kehidupan Sosial Budaya Masyarakat di Kampung Adat Lubuk Jering Kecamatan Sungai Mandau Kabupaten Siak diberi pengukuran dengan melakukan klafikasi penilaian sebagai berikut:

Terlaksana : Apabila semua indikator penelitian meliputi perencanaan, bimbingan, pengawasan dan evaluasi berada pada rentang persentase 67%-100%

Cukup Terlaksana : Apabila semua indikator penelitian meliputi perencanaan, bimbingan, pengawasan dan evaluasi berada pada rentang persentase 34%-66%

Kurang Terlaksana : Apabila semua indikator penelitian meliputi perencanaan, bimbingan, pengawasan dan evaluasi berada pada rentang persentase 0%-33%

Adapun pengukuran indikator sebagai berikut :

1. Perencanaan

Terlaksana : Apabila semua item penilaian indikator perencanaan berada pada rentang persentase 67%-100%

Cukup Terlaksana : Apabila semua item penilaian indikator perencanaan berada pada rentang persentase 34%-66%

Kurang Terlaksana : Apabila semua item penilaian indikator perencanaan pada rentang persentase 0%-33%

2. Bimbingan

Terlaksana : Apabila semua item penilaian indikator bimbingan berada pada rentang persentase 67%-100%

Cukup Terlaksana : Apabila semua item penilaian indikator bimbingan berada pada rentang persentase 34%-66%

Kurang Terlaksana : Apabila semua item penilaian indikator bimbingan berada pada rentang persentase 0%-33%

3. Pengawasan

Terlaksana : Apabila semua item penilaian indikator pengawasan berada pada rentang persentase 67%-100%

Cukup Terlaksana : Apabila semua item penilaian indikator pengawasan berada pada rentang persentase 34%-66%

Kurang Terlaksana : Apabila semua item penilaian indikator pengawasan berada pada rentang persentase 0%-33%

4. Evaluasi

Terlaksana : Apabila semua item penilaian indikator evaluasi berada pada rentang persentase 67%-100%

Cukup Terlaksana : Apabila semua item penilaian indikator evaluasi berada pada rentang persentase 34%-66%

Kurang Terlaksana : Apabila semua item penilaian indikator evaluasi berada pada rentang persentase 0%-33%

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Tipe penelitian ini survey deskriptif yaitu tipe penelitian yang menggambarkan mengenai variabel yang diteliti dan metode kuantitatif yaitu penelitian dalam bentuk persentase dan diakhiri dengan penarikan suatu kesimpulan dalam pemberian saran. Effendi (2010;90) Penelitian Kuantitatif merupakan penelitian yang menjadikan teori sebagai bingkai kerja dari seluruh penelitian.

Untuk mengetahui dan melihat serta melukiskan keadaan yang sebenarnya secara rinci dan actual dengan melihat masalah dan tujuan yang telah disampaikan sebelumnya dengan pengumpulan data yang dibutuhkan dalam penelitian ini, maka tipe penelitian ini yang digunakan adalah penelitian survey. Pengertian survey dibatasi dengan penelitian yang datanya dikumpulkan dari sample atau populasi untuk mewakili seluruh populasi. Dengan demikian, penelitian survey secara komplit adalah penelitian yang mengambil sampel dari tiap-tiap populasi dengan menggunakan kuesioner sebagai alat pengumpulan yang pokok. Penelitian ini akan menuntun si peneliti dalam membuat daftar pertanyaan kusioner yang dimaksud diatas untuk disebarkan kepada yang sudah ditentukan.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian tempat penulis melakukan penelitian ini adalah di Kampung Adat Lubuk Jering Kecamatan Sungai Mandau Kabupaten Siak. Pemilihan Lokasi Penelitian ini adalah karena penulis melihat ada indikasi permasalahan yang terjadi bahwa Penghulu Kampung kurang Efektif memberikan bimbingan dan pembinaan terhadap kehidupan sosial budaya masyarakat Desa sehingga masih rendahnya respon

Masyarakat Desa dalam pembinaan dan bimbingan yang dilakukan Kepala Desa terhadap kehidupan masyarakat Desa.

C. Populasi dan Sampel

Menurut Sugiono (2011:80) populasi adalah generalisasi yang terdiri atas objek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh penelitian untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Adalah jumlah keseluruhan suatu objek yang akan diteliti dalam penelitian ini meliputi populasi penelitian yaitu pemerintah kampung, lembaga dan perangkat kampung. Adapun Subjek penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel III.I : Jumlah Populasi Dan Sampel Penelitian

No	Subjek Penelitian	Populasi	Sampel	Persentase (%)
1	Penghulu	1	1	100%
2	Kerani	1	1	100%
3	Juru Tulis I	1	1	100%
4	Juru Tulis II	1	1	100%
5	BAPEKAM	7	7	100%
6	LPMK	11	11	100%
7	Kepala Dusun	2	2	100%
	Rukun Kampung	7	7	100%
7	Anggota Organisasi sosial dan kemasyarakatan yang aktif	56	28	50%
	Jumlah	87	59	-

Sumber : Data Olahan Penelitian, 2019

D. Teknik Penarikan Sampel

Berdasarkan pertimbangan penelitian dan pengelompokkan populasi, maka untuk menentukan populasi dan sampel penghulu, Kerani, Juru Tulis, Badan Permusyawaratan Kampung, LPMK, Kepala Dusun dan Rukun Kampung yang pertama digunakan teknik sensus untuk sampel yang tergolong kecil dan kedua random untuk populasi Anggota Organisasi sosial dan kemasyarakatan yang. Sehingga dapat diketahui jumlah sampel penelitian ini 59 sampel.

E. Jenis dan Sumber Data

a. Data primer.

Yaitu data atau keterangan yang diperoleh langsung dari seluruh responden melalui wawancara dan pedoman kusioner yang telah disiapkan terlebih dahulu.

b. Data sekunder

Yaitu data pendukung yang berkenaan dengan kegiatan pembinaan masyarakat pada Kampung Lubuk Jering, penjelasan umum, teori-teori dan dokumentasi yang relevan dengan masalah penelitian.

F. Teknik Pengumpulan Data

1. Observasi

Peneliti mengadakan pengamatan langsung terhadap objek yang akan diteliti sehingga peneliti dapat menilai terhadap Pelaksanaan Kewenangan penghulu dalam pembinaan kehidupan Sosial budaya masyarakat

2. Wawancara

Wawancara langsung yang peneliti lakukan dengan menggunakan daftar pertanyaan yang sudah disiapkan terlebih dahulu untuk memperoleh data mengenai masalah penelitian ini yang mana wawancara ini dilakukan Penghulu Kampung.

3. Kuesioner

Memberikan daftar pertanyaan yang sudah disiapkan terlebih dahulu untuk di isi oleh responden yang diharapkan dapat memberikan jawaban atau informasi sehubungan dengan masalah penelitian.

G. Teknik Analisis Data

Setelah data yang diperoleh dari responden penelitian, lalu dioleh unuk selanjutnya disajikan dalam bentuk tabel kemudian di analisis menggunakan metode deskriptif, agar gambaran kewenangan Penghulu Kampung dalam Membina Kehidupan Sosial Budaya Masyarakat di Kampung Adat Lubuk Jering Kecamatan Sungai Mandau Kabupaten Siak.

H. Jadwal Pelaksanaan Penelitian

Dibawah ini akan dipaparkan mengenai jadwal pelaksanaan penelitian ini dimulai Mei sampai dengan bulan Juli sampai dengan Oktober 2019. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel III.2 : Jadwal Pelaksanaan Penelitian Analisis Pelaksanaan kewenangan Penghulu Kampung dalam Membina Kehidupan Sosial Budaya Masyarakat di Kampung Adat Lubuk Jering Kecamatan Sungai Mandau Kabupaten Siak

No	JENIS KEGIATAN	BULAN DAN MINGGU KE															
		Juli				Agustus				September				Oktober			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Penyusunan UP																
2	Seminar UP																
3	Revisi Up																
4	Revisi Kuesioner																
5	Rekomendasi																
6	Survey Lapangan																
7	Analisis Data																
8	Penyusunan Laporan Hasil Penelitian (skripsi)																
9	Konsultasi Revisi Skripsi																
10	Ujian Konferensif Skripsi																
11	Revisi Skripsi																
12	Penggandaan Skripsi																

Sumber : Data Olahan Penelitian, 2019

BAB IV

DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN

A. Sejarah dan Gambaran Umum Kabupaten Siak

Sebelumnya kawasan ini merupakan bagian dari Kesultanan Siak Sri Inderapura. Di awal kemerdekaan Indonesia, Sultan Syarif Kasim II, merupakan Sultan Siak terakhir menyatakan kerajaannya bergabung dengan negara Republik Indonesia. Kemudian wilayah ini menjadi wilayah Kewedanan Siak di bawah Kabupaten Bengkalis yang kemudian berubah status menjadi Kecamatan Siak. Pada tahun 1999 berdasarkan UU No. 53 Tahun 1999, meningkat statusnya menjadi Kabupaten Siak dengan ibukotanya Siak Sri Indrapura.

Secara geografis Kabupaten Siak terletak pada koordinat 10 16' 30" — 00 20' 49" Lintang Utara dan 100 54' 21" 102° 10' 59" Bujur Timur. Secara fisik geografis memiliki kawasan pesisir pantai yang berhampiran dengan sejumlah negara tetangga dan masuk kedalam daerah segitiga pertumbuhan (growth triangle) Indonesia - Malaysia - Singapura. Adapun Batas wilayah administrasi Kabupaten Siak Antara lain:

- Utara : Kabupaten Bengkalis
- Selatan : Kabupaten Pelalawan
- Barat : Kabupaten Kampar dan Kota Pekanbaru
- Timur : Kabupaten Kepulauan Meranti

Bentang alam Kabupaten Siak sebagian besar terdiri dari dataran rendah di bagian Timur dan sebagian dataran tinggi di sebelah barat. Pada umumnya struktur tanah terdiri dari tanah podsolik merah kuning dan batuan dan alluvial serta tanah organosol dan gley humus dalam bentuk rawa-rawa atau tanah basah. Lahan semacam

ini subur untuk pengembangan pertanian, perkebunan dan perikanan. Daerah ini beriklim tropis dengan suhu udara antara 25° -- 32° Celsius, dengan kelembaban dan curah hujan cukup tinggi.

Selain dikenal dengan Sungai Siak yang membelah wilayah Kabupaten Siak, daerah ini juga terdapat banyak tasik atau danau yang tersebar di beberapa wilayah kecamatan. Sungai Siak sendiri terkenal sebagai sungai terdalam di tanah air, sehingga memiliki nilai ekonomis yang tinggi, terutama sebagai sarana transportasi dan perhubungan. Namun potensi banjir diperkirakan juga terdapat pada daerah sepanjang Sungai Siak, karena morfologinya relatif datar.

Selain Sungai Siak, daerah ini juga dialiri sungai-sungai lain, yaitu: Sungai Mandau, Sungai Gasib, Sungai Apit, Sungai Tengah, Sungai Rawa, Sungai Buntan, Sungai Limau, dan Sungai Bayam. Sedangkan danau-danau yang tersebar di daerah ini adalah: Danau Ketialau, Danau Air Hitam, Danau Besi, Danau Tembatu Sonsang, Danau Pulau Besar, Danau Zamrud, Danau Pulau Bawah, Danau Pulau Atas dan Tasik Rawa.

Berdasarkan perhitungan siklus hidrologi, 15% surplus air dan curah hujan rata-rata bulanan menjadi aliran permukaan, maka memungkinkan terjadinya banjir musiman pada bulan-bulan basah. Dan analisis data curah hujan diketahui bahwa bulan basah berlangsung pada bulan Oktober hingga Desember, sedangkan bulan kering pada bulan Juni hingga Agustus. Distribusi curah hujan semakin meninggi ke arah Pegunungan Bukit Barisan di bagian barat wilayah Provinsi Riau.

B. Sejarah Singkat Kampung Adat Lubuk Jering

Lubuk jering adalah salah satu kampung yang ada di Kabupaten Siak dan Kecamatan Sungai mandau serta termasuk Kampung tertua yang ada di Kabupaten Siak sekaligus Kecamatan Sungai Mandau. Kampung lubuk jering terbentuk dan berasal dari masyarakat yang hidup berpindah (nomaden), mata pencarian penduduk Kampung Adat Lubuk Jering yaitu bertani atau berladang berladang.

Kampung Adat Lubuk jering awalnya yaitu sebuah dusun dan belum bisa dikatakan sebagai desa/ kampung. Sejarah awal dari nama Lubuk Jering menurut sejarah yang tercatat yaitu karena di Lubuk Jering terdapat sungai yang cukup besar dan suku melayu merupakan suku pertama yang menenpati Lubuk Jering, diketahui bahwa suku melayu pada umumnya lebih suka membuat rumah atau tempat tinggal di tepi sungai.

Terdapat dua sejarah dari permulaan nama lubuk jering yang pertama terdapat satu pohong jering yang tumbuh di tepi sungai besar tersebut yang kedua, ialah terdapat cabang sungai dengan nama lain muara antar cabang sungai tersebut terdapat tanah timbul dan tumbuh satu pohon jering di tanah muara tersebut. Maka dari itu setiap masyarakat yang pulang dari tempat bertani atau ladang yang jauh, maka masyarakat menyebutnya dengan “pulang ke Lubuk Jering”. Sehingga setiap masyarakat menyebut desa tersebut menjadi desa Lubuk Jering. Namun sejarah berdirinya lubuk jering masih sebatas cerita turun temurun dan belum ada yang membukukan. Penghulu dari peratama terbentuknya Lubuk jering hingga saat ini yaitu sudah ada 8 penghulu.

Kampung Adat Lubuk Jering Kecamatan Sungai Mandau berada diwilayah administrasi Kabupaten Siak, dengan luas wilayah 7.000 ha, yang terdiri dari 2 (dua)

dusun, 3 (tiga) RK dan 7 (tujuh) RT. Dilihat dari batas wilayah administrasi, Kampung Lubuk Jering berbatasan dengan:

- Sebelah Utara : Kampung Buncah Umbai
- Sebelah Selatan : Kampung Muara Kelantan
- Sebelah Barat : Kampung Muara Bungkal
- Sebelah Timur : Kampung Olak

Penduduk Kampung Adat Lubuk Jering terdiri dari beberapa suku bangsa diantaranya ada Suku Melayu, Suku Jawa, Suku Batak. Suku asli adalah Suku Melayu. Meskipun terdapat berbagai suku yang ada di Kampung Adat Lubuk Jering namun keadaan masyarakat selalu damai. Jumlah penduduk Kampung Adat Lubuk Jering tercatat 341 kepala keluarga, dengan jumlah perempuan sebanyak 676 jiwa dan jumlah laki-laki sebanyak 780 jiwa.

Kondisi perekonomian masyarakat secara umum mengalami peningkatan dengan tahun sebelumnya, peningkatan ini dapat di lihat dari pola hidup sarana penunjang kehidupan sehari-hari, seperti tersediannya jalan poros kampung dan jalan menuju perkebunan, jalan kampung antar RT. Adapun jalan di Kampung Adat Lubuk Jering sebagian sudah ada yang disemenasi, dan masih ada yang menggunakan jalan tanah. Untuk melestarikan dan mengembangkan kebudayaan leluhur, masih terpelihara dengan baik dalam kehidupan masyarakat Kampung Adat Lubuk Jering yaitu acara pernikahan mulai dari merisik, antar belanja dan adat istiadat dalam pernikahan.

Tugas-tugas pemerintah pada umumnya adalah melayani kepentingan masyarakat dalam berbagai segi kehidupan, dari segi masalah kenamaan dan

ketertiban, kesehatan, kependudukan dan sebagainya. Untuk melihat struktur organisasi pemerintahan Kampung Adat Lubuk Jering dapat di lihat dari skema dibawah ini:

B.Deskripsi Singkat Pemerintahan Kampung Lubuk Jering

Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Penetapan Kampung Adat Di Kabupaten Siak Kampung adat pasal 6 memiliki fungsi Pemerintahan, Keuangan, Pembangunan, serta mendapat fasilitasi dan pembinaan dari Pemerintah Kabupaten. Kampung adat pada dasarnya melakukan tugas yang hampir sama dengan Kampung, sedangkan perbedaannya hanyalah dalam pelaksanaan hak asal usul, terutama menyangkut kelestarian sosial, pengaturan dan pengurusan wilayah adat, sidang perdamaian adat, pemeliharaan ketentraman dan ketertiban bagi masyarakat hukum adat, serta pengaturan pelaksanaan pemerintahan berdasarkan susunan asli. Pemerintah Kampung Adat terdiri dari:

- a. Penghulu; dan
- b. Perangkat Kampung Adat.
 - a. Sekretariat Kampung Adat;
 - b. Unsur kewilayahan; dan
 - c. Pelaksana teknis lapangan.
- c. Sekretariat
 - a. Juru tulis,
 - b. staf, atau
 - c. unsur pembantu kerani.
- d. Unsur kewilayahan
 - a. kadus,

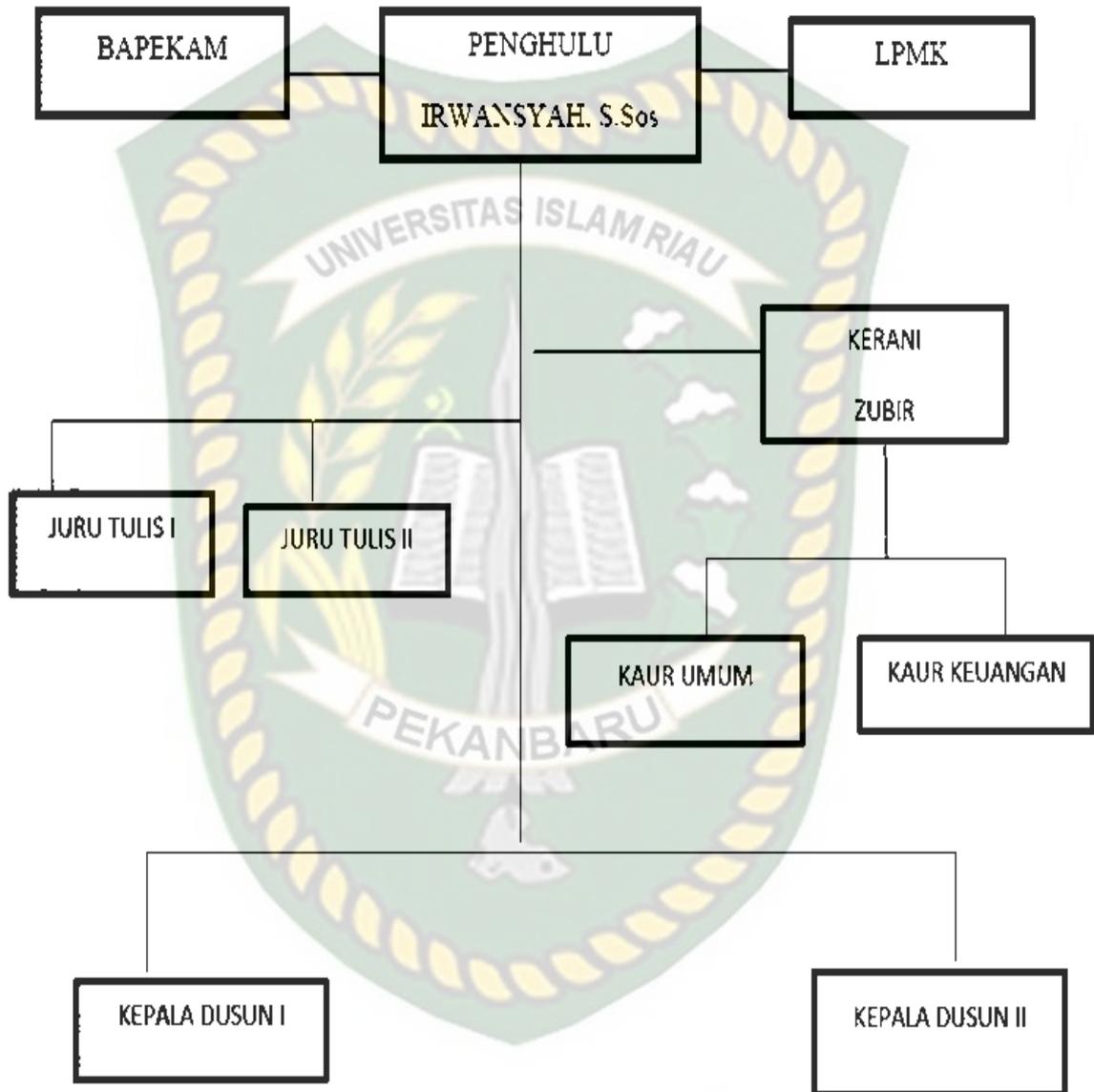
- b. rukun kampung dan
- c. rukun tetangga.
- e. Pelaksana teknis lapangan

Untuk tercapainya penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat serta tidak melanggar adat-istiadat, Kampung Adat mempunyai kewenangan sebagai berikut :

- a. pengaturan dan pelaksanaan Pemerintahan berdasarkan susunan asli;
- b. pengaturan dan pengurusan ulayat atau wilayah adat;
- c. pelestarian nilai sosial budaya kampung adat;
- d. penyelesaian sengketa adat berdasarkan hukum adat yang berlaku di kampung adat dalam wilayah yang selaras dengan prinsip hak asasi manusia dengan mengutamakan penyelesaian secara musyawarah;
- e. penyelenggaraan sidang perdamaian peradilan kampung adat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- f. pemeliharaan ketentraman dan ketertiban masyarakat desa adat berdasarkan hukum adat yang berlaku di kampung adat; dan
- g. pengembangan kehidupan hukum adat sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat kampung adat.

C. Struktur pemerintah Kampung Adat Lubuk Jering

Gambar IV. Struktur Pemerintahan Kampung Adat Lubuk Jering



Sumber: Kantor Penghulu Kampung Adat Lubuk Jering, 2019

D. Tugas dan fungsi Pemerintah Kampung dan Lembaga Kampung Adat Lubuk Jering

1. Pengulu Kampung

1. Meningkatkan peran serta pemerintahan Kampung Adat, lembaga masyarakat dan tokoh adt yang berorientasi kepada adat dan istiadat setempat dalam penyelenggaraan pemerintah Kampung Adat
2. Meningkatkan peran tokoh adat terkait dengan kegiatan sosial kebudayaan dalam kehidupan masyarakat.
3. Meningkatkan peran tokoh adat yang di tunjuk sebagai orang yang dituakan untuk lebih berperan aktif menghidupkn kembali adt istiadat di Kampung Adat
4. Melestarikan adat istiadat yang hampir hilang yang diakibatkan oleh urbanisasi dari daerah lain, sehingga adt istiadat lokal dapat dihiupkan dan dikembangkan kembali.

2. Kerani/ Sekretaris Penghulu Kampung

1. Melakukan penyusunan rencana, pengendalian dan mengevaluasi pelaksanaanya
2. Melakukan penyelenggaraan pengawasan dan pembinaan administrasi kepegawaian, keuangan, penyelenggaraan perlengkapan rumah tangga Kampung.
3. Memipin sekretariat kecamatan dan memberikan pelayanan administrasi ketatausahaan kepada seluruh perangkat kampung

Sekretretaris /sekretariat kampung adat terdiri dari juru tulis, staf dan unsur pembantu kerani.

3. Pelaksana teknis lapangan

Pelaksana teknis lapangan sebagaimana dimaksud yaitu petugas Kampung Adat yang melakukan suatu tugas tertentu dalam perkampungan Adat seperti urusan agama, keamanan, pengairan, pertanian, pemadaman kebakaran hutan dan lahan atau urusan lain yang jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat. Pelaksana.

2. Badan Permusyawaratan Kampung (BAPEKAM)

BAPEKAM mempunyai fungsi membahas dan menyepakati rancangan peraturan kampung bersama penghulu, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat kampung dan melakukan pengawasan kinerja penghulu. Dalam pemerintahannya Badan Permusyawaratan Kampung juga mempunyai wewenang dalam menjalankan tugas sebagai aparat Kampung, antara lain:

1. Membahas rancangan Peraturan kampung bersama penghulu
2. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan kampung dan peraturan penghulu
3. Mengusulkan pengangkatan dan pembebrhentian penghulu
4. Membentuk panitia pemilihan penghulu, menggali, menampung, merumuskan dan menyalurkan aspirasi masyarakat.
5. Mengadakan perubahan peraturan kampung bersama penghulu
6. Menyusun tata tertib BAPEKAM
7. Menetapkan calon penghulu terpilih.

4. Lembaga Adat Kampung Lubuk Jering

Lembaga Adat pada Kampung Lubuk Jering merupakan lembaga adat yang tidak terpisahkan dari Lembaga Adat Melayu Riau Kabupaten Siak. Lembaga Adat Kampung Adat Lubuk Jering merupakan mitra Pemerintahan Kampung Lubuk Jering dan Lembaga Adat lainnya dalam memberdayakan kampung Adat. Adapun tugas dan wewenang lembaga adat Kampung Lubuk Jering adalah sebagai berikut:

Lembaga Adat Kampung Adat mempunyai tugas:

- a. mendukung program pemerintah melaksanakan pembangunan disegala bidang terutama dibidang keagamaan, kebudayaan dan kemasyarakatan dengan semangat kegotong royongan;
- b. mengembangkan nilai-nilai budaya tempatan dalam rangka memperkaya, melestarikan dan mengembangkan kebudayaan nasional;
- b. menyelesaikan sengketa Adat dan Agama dalam lingkungan wilayahnya, dengan tetap membina kerukunan dan toleransi antar umat beragama;
- c. membuat Peraturan Adat untuk dipedomani dan dilaksanakan oleh masyarakat;
- d. memilih Penghulu sesuai peraturan yang berlaku;
- e. melaksanakan Upacara Adat; dan
- f. melaksanakan tugas lain sesuai wewenang yang dilimpahkan oleh Lembaga Adat Melayu Riau Kabupaten Siak.

Lembaga Adat Kampung Adat mempunyai wewenang:

- a. memusyawarahkan berbagai hal yang menyangkut permasalahan Adat dan Agama;

- b. sebagai penengah terhadap kasus adat yang tidak dapat diselesaikan pada tingkat Kampung Adat; dan
- c. membantu penyelenggaraan upacara Adat/Keagamaan di Kecamatan, Kabupaten dan Provinsi.

Lembaga Kemasyarakatan Kampung Adat dibentuk atas prakarsa Pemerintah Kampung Adat dan Masyarakat. Lembaga Kemasyarakatan Kampung Adat sebagaimana dimaksud bertugas:

- a. melakukan Pemberdayaan Masyarakat Kampung Adat;
- b. ikut serta dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan; dan
- c. meningkatkan pelayanan Masyarakat Kampung Adat.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud lembaga kemasyarakatan Kampung Adat memiliki fungsi:

- a. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat;
- b. menanamkan dan memupuk rasa persatuan dan kesatuan masyarakat;
- c. meningkatkan kualitas dan mempercepat pelayanan pemerintah Kampung Adat kepada masyarakat adat;
- d. menyusun rencana, melaksanakan, mengendalikan, melestarikan dan mengembangkan hasil pembangunan secara partisipatif;
- e. menumbuhkan, mengembangkan, dan menggerakkan prakarsa, partisipasi, swadaya, serta gotong-royong masyarakat;
- f. meningkatkan kesejahteraan keluarga; dan
- g. meningkatkan kualitas sumberdaya manusia

Adapun Lembaga Adat Kampung Adat Lubuk Jering Kecamatan Sungai Mandau disebut dengan Pemangku Adat.

BAB V

HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN

Setelah melakukan penelitian mengenai Analisis Pelaksanaan Kewenangan Penghulu Kampung Dalam Membina Kehidupan Sosial Budaya Masyarakat di Kampung Adat Lubuk Jering Kecamatan Sungai Mandau Kabupaten Siak, dengan instrumen penelitian yaitu kuesioner sebagai alat pengumpul data dan juga wawancara serta observasi yang dilakukan untuk melihat Pelaksanaan Kewenangan Penghulu Kampung Dalam Membina Kehidupan Sosial Budaya Masyarakat Di Kampung Adat Lubuk Jering, pada tahapan awal kuesioner yang terdapat didalamnya salah satunya identitas responden penelitian yang terdiri dari pendidikan, umur dan jenis kelamin, identitas responden hal ini untuk menggambarkan kondisi atau keadaan responden penelitian melalui beberapa identitas responden.

A. Identitas Responden

Identitas responden dalam penelitian ini adalah menguraikan atau memberikan gambaran mengenai rincian mengenai kondisi responden dalam hal ini pihak pemerintahan Kampung Adat Lubuk Jering, lembaga kemasyarakatan, BAPEKAM, lembaga pemberdayaan serta anggota lembaga. Dengan menguraikan identitas responden yang menjadi sampel penelitian ini maka akan dapat diketahui tingkat pendidikan, umum dan jenis kelamin dalam penelitian ini dari semua itu akan diketahui bahwa responden penelitian dalam kategori apa. Oleh karena itu identitas responden dalam penelitian ini dapat dikelompokkan menjadi beberapa kelompok yaitu tingkat pendidikan, umur dan jenis kelamin.

Dalam pelaksanaan penelitian ini ditetapkan sebanyak 58 responden yang terdiri dari pemerintah Kampung Adat Lubuk Jering, lembaga kemasyarakatan,

BAPEKAM, lembaga pemberdayaan serta anggota yang aktif dalam lembaga yang ada di Kampung Adat Lubuk Jering, oleh karena itulah akan disajikan deskripsi identitas responden, yang terdiri dari jenis kelamin, umur dan pendidikan yang berguna untuk mengetahui kondisi responden secara umum untuk yang pertama akan diuraikan identitas responden penelitian berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel. V.1. Distribusi responden penelitian berdasarkan Jenis Kelamin

No.	Jenis Kelamin	Jumlah Responden	Persentase
1	Laki-Laki	49	79%
2	Perempuan	9	21%
Jumlah		58	100%

Sumber : Data Penelitian, 2019.

Dari tabel diatas terlihat bahwa responden penelitian yaitu didominasi oleh jenis kelamin laki-laki yang berjumlah 49 orang responden dengan presentase 79% dan responden dengan jenis kelamin perempuan kemudian jumlah responden perempuan yaitu 9 orang atau 21%. Pada kategori ini bukan untuk membedakan saja tetapi untuk melihat bagaimana persebaran responden penelitian. Kemudian distribusi responden Pekanbaru berdasarkan Umur dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel V. 2. Distribusi Responden penelitian Berdasarkan Umur

No	Umur	Responden	Persentase
1	≤ 30 tahun	8	14%
2	30 - 39 tahun	32	55%
3	40 - 49 tahun	14	24%
4	≥ 50 tahun	4	9%
jumlah		58	100%

Sumber : Data Penelitian, 2019

Dari tabel diatas terlihat bahwa responden penelitian yang paling banyak pada umur antara 30 – 39 tahun yaitu 32 responden atau dengan presentase 55%, yang mana artinya setengah dari responden ini berada pada jenjang atau tingkatan umur yang produktif dalam berkerja atau berkegiatan dalam organisasi, kemudian pada

tingkatan umur 40- 49 tahun 14 responden atau 24%, kemudian ≤ 30 tahun yaitu 8 Orang atau 14%, serta > 50 tahun berjumlah 4 orang. Kemudian distribusi Responden penelitian berdasarkan tingkat pendidikan, maka untuk jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel V. 3. Distribusi Responden penelitian berdasarkan Tingkatan Pendidikan

No.	Tingkat pendidikan	Responden	Persentase
1	SMP	11	19%
2	SMA	42	72%
3	Diploma	1	2%
4	Sarjana	4	8%
5	Pasca sarjana	-	-
Jumlah		58	100%

Sumber : Data Penelitian, 2019.

Dari Tabel diatas tingkat pendidikan responden penelitian yang paling banyak pada tingkatan SMA sebanyak 42 orang responden atau dengan presentase 72%, kemudian diketahui bahwa rata-rata tingkat pendidikan responden penelitian yang mana anggota lembaga kemasyarakatan seperti pemuda dan lembaga wanita memiliki tingkat pendidikan yang cukup tinggi. Setelah mendeskripsikan responden penelitian melalui beberapa klasifikasi maka setelah itu dan selanjutnya dilakukan pembahasan mengenai hasil penelitian dibawah ini.

B. Hasil dan Pembahasan Penelitian

Setelah melakukan penelitian dengan menggunakan kuesioner dan wawancara serta observasi sebagai alat pengumpul data penelitian, kemudian dari data yang telah dikumpulkan dan di olah tersebut maka akan dilakukan pembahasan hasil penelitian mengenai Pelaksanaan Kewenangan Penghulu Kampung Dalam Membina Kehidupan Sosial Budaya Masyarakat di Kampung Adat Lubuk Jering Kecamatan Sungai Mandau Kabupaten Siak yang terdiri dari 4 (empat) indikator yaitu pembinaan yaitu

perencanaan, bimbingan, pengawasan dan evaluasi maka akan dilakukan pembahasan masing-masing indikator penelitian yang dapat dilihat dibawah ini.

1. Perencanaan

Perencanaan ialah sebagai sebuah proses yang dimulai dari penetapan tujuan organisasi, menentukan strategi untuk pencapaian tujuan organisasi tersebut secara menyeluruh, serta merumuskan sistem perencanaan yang menyeluruh untuk mengintegrasikan dan mengoordinasikan seluruh pekerjaan organisasi hingga tercapainya tujuan organisasi. Dalam hal ini bagaimana penghulu Kampung dapat menyusun rencana kegiatan pembinaan kehidupan masyarakat desa yang akan di laksanakan dan melihat sisi prioritas kegiatan mana yang harus di lakukan terlebih dahulu untuk meningkatkan kondisi sosial dan budaya Kampung Lubuk Jering menjadi lebih baik.

Setelah peneliti menyebarkan kuesioner kemudian mengolah data yang didapatkan dari kuesioner tersebut, wawancara serta observasi yang dilakukan maka di diketahui beberapa hal mengenai indikator perencanaan pembinaan kehidupan sosial budaya di Kampung Lubuk Jering Kecamatan Sungai Mandau yang di laksanakan oleh Penghulu Kampung untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel V. 4. Distribusi jawaban responden penelitian tentang mengenai perencanaan

No	Item Penilaian	Jawaban Responden			Jumlah
		Terlaksana	Cukup Terlaksana	Kurang Terlaksana	
1	Menyusun rencana	48 (83%)	10 (17%)	-	58
2	Menetapkan strategi	10 (17%)	12 (21%)	36 (62%)	58

3	Koordinasi antar lembaga	10 (17%)	48 (83%)	-	58
	Jumlah	68	70	36	174
	Rata-Rata	21	23	12	58
	Persentase	36%	40%	21%	100%

Sumber : Data Penelitian, 2019

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa rata-rata responden penelitian yaitu pemerintah desa, BAPEKAM, lembaga pemerberdayaan serta anggota lembaga yang aktif dan juga Kepala Dusun serta rukun Kampung menjawab bahwa indikator perencanaan dengan kategori cukup terlaksana rata-rata 23 responden, kemudian sebanyak 21 responden dengan presentase 36% menyatakan terlaksana, serta rata-rata 12 responden menyatakan perencanaan yang disusun oleh penghulu kurang terlaksana karena tidak disertakan strategi pelaksanaannya.

Dalam perencanaan yang di lakukan oleh Penghulu Kampung adat tentunya di awali dengan tahap penyusunan bersama dengan BAPEKAM dengan Maka untuk meningkatkan kegiatan dibidang sosial dan budaya Pemerintah Kampung Adat Lubuk Jering menganggarkan sebesar Rp. 84.500.000,- melalui Keputusan Kepala Kampung PERKAM NO. 3 tahun 2019 tentang Persetujuan Bersama BAPEKAM dan juga lembaga serta mengikut sertakan Kepala Dusun dan Rukun Kampung dalam penyerapan aspirasi dan juga pembahasannya, diketahui bahwa beberapa kegiatan yang dianggarkan ialah:

1. Pembinaan kehidupan sosial masyarakat
2. Pembinaan keagamaan kampung
3. Pembinaan organisasi Pemuda dan LPMK
4. Kegiatan pembinaan hari besar islam
5. pembinaan ketahanan sosial budaya masyarakat desa guna mewujudkan masyarakat desa yang mampu memelihara kesatuan sosial

6. pembinaan lembaga adat kampung Lubuk Jering

Dari data yang didapatkan diketahui bahwa memang ada penyusunan rencana berupa kegiatan dan anggaran yang disediakan kepada pembinaan sosial budaya Kampung Lubuk Jering, tetapi memang tidak disertai dengan strategi-strategi tertentu untuk mensukseskannya, dari tanggapan responden yang di dapatkan bahwa strategi umumnya ialah koordinasi antar lembaga yang ada di kampung hingga tingkat Rukun Kampung. Informasi yang didapatkan dari Penghulu Kampung Lubuk Jering mengenai perencanaan pembinaan kehidupan masyarakat bidang sosial budaya sebagai berikut:

“tentunya dalam setiap kegiatann terlebih dahulu dilakukan perencanaan seperti di buat daftar kegiatan yang nantinya akan dibahas terlebih dahulu bersama lembaga lain yang nantinya mana yang akan menjadi prioritas untuk tahun mendatang, kalau strategi khusus tidak ada tetapi hanya koordinasi antar lembaga saja” **(wawancara dengan Bapak Irwansyah, 25 November 2019)**

Kemudian hasil wawancara yang hampir sama di jelaskan oleh Ketua Badan Permusyawaratan Kampung mengenai perencanaan sebagai berikut:

“semuanya tentu di rencanakan pada tahap awal juga akan dibahas bersama kami BAPEKAM, nantinya akan di ketahui mana yang prioritas mana yang buka setelah itu baru akan di usulkan kepada pemerintah daerah, kalau strategi saya rasa tidak ada yang khusus karena kita skopnya hanya kampung sehingga tidak perlu strategi yang khusus”. **(wawancara dengan Bapak Hairat, 25 November 2019)**

Dari hasil wawancara diatas dapat diketahui bahwa pihak pemerintah desa memang melakukan perencanaan pada awal kegiatan yaitu dituangkan dalam anggaran kampung, setelah itu baru untuk kegiatannya akan dibagi-bagi pada lembaga yang ditunjuk, tetapi diketahui bahwa memang tidak adanya strategi khusus dalam pelaksanaan pembinaan sosial budaya ini hanya menekankan kepada komunikasi dan koordinasi antar lembaga yang ada.

Hasil observasi yang dilakukan dengan melihat beberapa dokumen yang dimiliki oleh pemerintah desa, BAPEKAM dan juga lembaga pemuda serta PKK memang terdapat beberapa kegiatan pembinaan seperti penyusunan anggaran kegiatan pembinaan untuk beberapa lembaga dan juga adanya kegiatan yang dilakukan oleh Penghulu Kampung Lubuk jering yang mengikutsertakan lembaga Adat dalam kegiatan adat yang di laksanakan pada waktu tertentu, kegiatan keagamaan dan kegiatan sosial lainnya, setelah melakukan pembahasan mengenai indikator perencanaan dapat diambil kesimpulan bahwa perencanaan dalam pembinaan kehidupan sosial budaya masyarakat Kampung Adat Lubuk Jering dalam kategori cukup terlaksana.

2. Bimbingan

Bimbingan atau pengarahan adalah kegiatan yang dilakukan pimpinan untuk membimbing, menggerakkan, mengatur segala kegiatan yang telah di beri tugas dalam melaksanakan sesuatu kegiatan usaha. Dalam hal ini bimbingan dilakukan oleh kepala desa dalam membina kehidupan masyarakat desa dengan cara persuasif atau bujukan dan intruktif tergantung cara yang mana yang paling efektif. Bimbingan ini biasa dilakukan oleh pimpinan organisasi di karenakan dalam perencanaan tentunya di lakukan oleh pemimpin dan bimbing di lakukan untuk memberikan petunjuk dan informasi dalam pelaksanaan kegiatan pembinaan kehidupan sosial budaya masyarakat Kampung yang mana penghulu sebagai pemimpin pemerintahan Kampung.

Setelah peneliti menyebarkan kuesioner kemudian mengolah data yang didapatkan dari kuesioner tersebut, wawancara serta observasi yang dilakukan maka di diketahui beberapa hal mengenai indikator bimbingan yang dilakukan penghulu

Kampung Adat Lubuk Jering dalam pembinaan kehidupan sosial budaya masyarakat Kampung untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel V. 5. Distribusi jawaban responden penelitian tentang mengenai bimbingan

No	Item Penilaian	Jawaban Responden			Jumlah
		Terlaksana	Cukup Terlaksana	Kurang Terlaksana	
1	Membimbing	48 (83%)	10 (17%)	-	58
2	Menggerakkan	37 (64%)	21 (36%)	-	58
3	Memberikan intruksi	10 (17%)	48 (83%)	-	58
Jumlah		95	79	-	174
Rata-Rata		32	26	-	58
Persentase		55%	45%	-	100%

Sumber : Data Penelitian, 2019

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa responden penelitian dalam hal ini pemerintah desa, BAPEKAM, lembaga pemerberdayaan serta anggota lembaga yang aktif dan juga Kepala Dusun serta rukun Kampung mendominasi indikator bimbingan dengan jawaban terlaksana dengan rata-rata 32 atau presentase 55%, untuk kategori cukup terlaksana dengan rata-rata 26 atau dengan presentase 45%. Dari hasil penyebaran kuesioner dan jawaban responden didapatkan bahwa penghulu Kampung ada memerikan bimbingan atau arahan kepada anggota lembaga masyarakat, Adat, pemuda maupun wanita yang ada di Kampung baik pada saat pembahasan anggaran kampung maupun saat di adakan kegiatan. Tetapi juga diketahui bahwa intruksi secara langsung yang dilakukan penghulu dilaksanakan hanya saat pembahasan anggaran dan kegiatan saja tidak saat kegiatan pembinaan berlangsung yang mana hanya sekali saja dalam setiap pembahasan anggaran saja. Informasi yang didapatkan selanjutnya dari wawancara dari Penghulu Kampung Lubuk Jering mengenai bimbingan pembinaan kehidupan masyarakat bidang sosial budaya sebagai berikut:

“bimbingan tentu ada dilakukan baik saat perencanaan dan pembahasan serta saat kegiatannya juga, tetapi kita percayakan kepada lembaga masing-masing kemudian dari hasil kegiatan tentunya kita harapkan adanya laporan pelaksanaan kegiatan serta rincian dana yang digunakan” (**wawancara dengan Bapak Irwansyah, 25 November 2019**)

Kemudian hasil wawancara yang hampir sama di jelaskan oleh Ketua Badan Permusyawaratan Kampung mengenai perencanaan sebagai berikut:

“kalau bimbingan ada beberapa kali dilakukan tetapi intruksi khusus tidak ada karena lembaga masing-masing telah tahu kapasitasnya dan tugasnya dalam pembinaan lembaga masing-masing maupun yang berkaitan dengan masyarakat”. (**wawancara dengan Bapak Hairat, 25 November 2019**)

Dari hasil wawancara diatas dapat diketahui bahwa kegiatan bimbingan pada pembinaan kehidupan masyarakat sosial budaya di Kampung Adat Lubuk Jering dilakukan saat pembahasan anggaran, pengesahan anggaran dan juga sebelum kegiatan di mulai, sehingga bimbingan dari penghulu kepada anggota lembaga masyarakat, pemuda dan wanita dilakukan pada saat bersamaan, dari hasil observasi diketahui memang benar bimbingan dilakukan saat pembahasan kegiatan pembinaan atau pada rapat kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah Kampung Lubuk Jering bersama BAPEKAM dan Lembaga Adat, Pemuda serta wanita. Maka dari itu dapat diambil kesimpulan mengenai indikator bimbingan kehidupan Sosial Budaya di Kampung Adat Lubuk Jering yang di laksanakan penghulu kampung dalam kategori terlaksana.

3. Pengawasan

Pengawasan ialah merupakan tindakan untuk melihat suatu kegiatan yang sedang berjalan, jika di maksudkan kepada fungsi manajemen yang juga merupakan fungsi sebagai seorang pemimpin organisasi Merupakan fungsi seorang pemimpin yaitu Penghulu kampung yang merupakan usaha untuk menjaga suatu kegiatan tetap berjalan dengan semestinya. Fungsi pengawasan adalah fungsi terakhir dari proses

manajemen. Fungsi ini sangat penting dan sangat menentukan pelaksanaan proses manajemen, karena itu harus dilakukan dengan sebaik-baiknya. Pengawasan ialah proses pemantauan, penilaian, dan pelaporan rencana atas pencapaian tujuan yang telah ditetapkan untuk tindakan korektif guna penyempurnaan lebih lanjut. Setelah peneliti menyebarkan kuesioner kemudian mengolah data yang didapatkan dari kuesioner tersebut, wawancara serta observasi yang dilakukan maka di ketahui beberapa hal mengenai indikator pengawasan kehidupan sosial budaya masyarakat Kampung Adat Lubuk Jering untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel V. 6. Distribusi jawaban responden penelitian tentang mengenai pengawasan

No	Item Penilaian	Jawaban Responden			Jumlah
		Terlaksana	Cukup terlaksana	Kurang terlaksana	
1	Pemantauan	48 (83%)	10 (17%)	-	58
2	Mengatur	10 (17%)	12 (21%)	36 (62%)	58
3	Memperbaiki kegiatan	10 (17%)	48 (83%)	-	58
Jumlah		68	70	36	174
Rata-Rata		21	23	12	58
Persentase		36%	40%	21%	100%

Sumber : Data Penelitian, 2019

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa rata-rata responden penelitian yaitu pemerintah desa, BAPEKAM, lembaga pemerberdayaan serta anggota lembaga yang aktif dan juga Kepala Dusun serta rukun Kampung menjawab bahwa indikator pengawasan dengan kategori cukup terlaksana rata-rata 23 responden, kemudian sebanyak 21 responden dengan presentase 36% menyatakan terlaksana, serta rata-rata

12 responden menyatakan tidak tahu mengenai perbaikan kegiatan sosial dan budaya di Kampung Lubuk Jering yang dilakukan oleh penghulu. Informasi yang didapatkan selanjutnya dari wawancara dengan Penghulu Kampung Lubuk Jering mengenai pengawasan pembinaan kehidupan masyarakat bidang sosial budaya sebagai berikut:

“kalau pengawasan biasa dilakukan melalui laporan kegiatan bisa juga dari kegiatannya langsung, kalau tidak benar ya langsung di tegur atau di perbaiki disaat kegiatan tersebut, tetapi biasanya saya melimpahkan kepada krani atau juru tulis” (wawancara dengan Bapak Irwansyah, 25 November 2019)

Kemudian hasil wawancara yang hampir sama di jelaskan oleh Ketua Badan Permusyawaratan Kampung mengenai perencanaan sebagai berikut:

“pengawasan bersama dilakukan oleh kami dan penghulu, karena kami juga punya fungsi pengawasan kegiatan pemerintahan desa sehingga biasanya pada saat pelaporan pertanggungjawaban kegiatan kami juga melihat hasil kegiatan tersebut”. (wawancara dengan Bapak Hairat, 25 November 2019)

Dari hasil wawancara diatas dapat diketahui bahwa kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh penghulu Kampung Adat Lubuk Jering dapat dilakukan secara langsung maupun melalui tidak langsung dengan melakukan kunjungan pada kegiatan pembinaan dan juga melihat laporan hasil kegiatan serta mewakili baik kepada krani maupun kepada juru tulis untuk menghadiri kegiatan yang dilaksanakan oleh lembaga adat, lembaga kepemudaan (Karang Taruna) maupun Wanita (PKK), dari hasil observasi yang dilakukan memang terdapat beberapa kegiatan pembinaan yang dilakukan seperti acara adat rutin yang dilakukan, kemudian acara-acara pemberdayaan remaja, pemuda dan wanita di Kampung Lubuk Jering, maka dari itu dapat diambil kesimpulan mengenai indikator pengawasan pembinaan kehidupan sosial budaya masyarakat dalam kategori cukup terlaksana.

4. Evaluasi

Evaluasi atau penilaian merupakan kegiatan sadar untuk membandingkan hasil yang seharusnya dicapai dan yang menurut kenyataan dicapai. Selanjutnya Evaluasi atau penilaian, evaluasi juga merupakan suatu proses analisis data yang diperoleh untuk menentukan hasil faktual dari pelaksanaan pengawasan itu. Instrumen yang digunakan dalam proses penilaian dapat menggunakan instrument pengawasan. Jika demikian halnya perbedaan mendasar antara pengawasan dan penilaian terletak pada aspek orientasi waktu, sasaran dan pemanfaatannya, maka evaluasi kegiatan dilakukan diakhir kegiatan dilaksanakan dapat dilakukan melalui pertanggungjawaban yang telah di laksanakan atau juga dari hasil pengawasan. Evaluasi berguna untuk melihat dan memperbaiki kegiatan agar kegiatan selanjutnya berjalan dengan baik.

Setelah peneliti menyebarkan kuesioner kemudian mengolah data yang didapatkan dari kuesioner tersebut, wawancara serta observasi yang dilakukan maka di diketahui beberapa hal mengenai indikator evaluasi setelah pembinaan sosial budaya masyarakat Kampung Adat yang di lakukan oleh pemerintah Kampung yaitu Penhulu untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel V. 7. Distribusi jawaban responden penelitian tentang mengenai evaluasi

No	Item Penilaian	Jawaban Responden			Jumlah
		Terlaksana	Cukup Terlaksana	Kurang Terlaksana	
1	Membandingkan hasil	16 (28%)	42 (72%)	-	58
2	Penilaian	35 (60%)	23 (40%)	-	58
3	Pelaporan	40 (69%)	18 (31%)	-	58
Jumlah		91	83	-	174

Rata-Rata	30	28	-	58
Persentase	52%	48%	-	100%

Sumber : Data Penelitian, 2019

Dari tabel indikator pengawasan diatas diketahui bahwa responden penelitian rata-rata menjawab cukup terlaksana dengan jumlah 28 responden dan persentase 48%, kemudian untuk kategori terlaksana dengan rata-rata 30 responden atau presentase 52%, maka dapat dikatehui bahwa pengawasan yang dilakukan oleh Penghulu Kampung Adat dalam pembinaan Kehidupan sosial budaya dalam kategori Cukup Terlaksana, tetapi terdapat banyak anggota lembaga masyarakat, pemuda dan juga wanita yang tidak mengetahui mengenai laporan pelaksanaan pembinaan yang dilakukan oleh penghulu Kampung. Kemudian informasi selanjutnya di lakukan dengan wawancara dengan Penghulu Kampung adat Lubuk Jering mengenai evaluasi kegiatan pembinaan kehidupan masyarakat bidang sosial budaya sebagai berikut:

“penilaian atau evaluasi memang ada kita lihat dari laporan kegiatan yang disusun oleh lembaga masing-masing atau nantinya bisa dilakukan pada saat laporan pertanggungjawaban saya sendiri, dari hasil nanti kita bisa tahu berhasil atau tidak” **(wawancara dengan Bapak Irwansyah, 25 November 2019)**

Kemudian hasil wawancara yang hampir sama di jelaskan oleh Ketua Badan Permasyarakatan Kampung (BAPEKAM) mengenai perencanaan sebagai berikut:

“evaluasi ada setiap akhir tahun atau setiap kegiatan yang dilaksanakan oleh lembaga yang ada diberikan anggaran kegiatan pembinaan, dan juga menjadi tanggungjawab penghulu untuk melapor penggunaan anggaran dan kegiatan satu tahun trakhir”. **(wawancara dengan Bapak Hairat, 25 November 2019)**

dari wawancara yang di lakukan dapat diketahui bahwa dalam melakukan evaluasi dilakukan penghulu dan BAPEKAM secara bersama tetapi dari pihak penghulu melihat sebarapa berhasil kegiatan melalui laporan dan tinjauan kegiatan tersebut, maka dapat diketahui evaluasi yang dilakukan dalam kategori cukup terlaksana. Setelah melakukan pembahasan mengenai pembinaan kehidupan

masyarakat bidang sosial budaya di Kampung Adat Lubuk Jering menurut indikator selanjutnya dilakukan rekapitulasi hasil keseluruhan indikator yang mana dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel V. 8. Distribusi jawaban responden penelitian tentang Pelaksanaan Kewenangan Penghulu Kampung Dalam Membina Kehidupan Sosial Budaya Masyarakat Di Kampung Adat Lubuk Jering Kecamatan Sungai Mandau Kabupaten Siak

No	Item Penilaian	Jawaban Responden			Jumlah
		Terlaksana	Cukup Terlaksana	Kurang Terlaksana	
1.	Perencanaan	21 (36%)	23 (40%)	12 (21%)	58
2.	Bimbingan	32 (55%)	26 (45%)	-	58
3.	Pengawasan	21 (36%)	23 (40%)	12 (21%)	58
4.	Evaluasi	30 (52%)	28 (48%)	-	58
Jumlah		104	100	24	232
Rata-Rata		26	25	6	58
Persentase		45%	43%	10%	100%

Sumber : Data Penelitian, 2019

Dari tabel rekapitulasi diatas mengenai indikator pembinaan pada penelitian mengenai Pelaksanaan Kewenangan Penghulu Kampung Dalam Membina Kehidupan Sosial Budaya Masyarakat Di Kampung Adat Lubuk Jering Kecamatan Sungai Mandau Kabupaten Siak mengenai perencanaan melalui penganggaran kegiatan pembiaian pada anggaran pendapatan dan belanja Kampung yang di susun, bimbingan dari penghulu dalam kegiatan pembinaan sosial budaya, pengawasan dalam kegiatan pembinaan dan penilaian akhir dari kegiatan pembinaan kehidupan sosial budaya masyarakat kampung dapat disimpulkan bahwa Pelaksanaan Kewenangan Penghulu Kampung Dalam Membina Kehidupan Sosial Budaya Masyarakat Di Kampung Adat Lubuk Jering Kecamatan Sungai Mandau Kabupaten Siak dalam kategori cukup terlaksana.

C. Faktor-faktor penghambat Pelaksanaan Kewenangan Penghulu Kampung Dalam Membina Kehidupan Sosial Budaya Masyarakat Di Kampung Adat Lubuk Jering Kecamatan Sungai Mandau Kabupaten Siak.

Setelah dilakukan penelitian mengenai Pelaksanaan Kewenangan Penghulu Kampung Dalam Membina Kehidupan Sosial Budaya Masyarakat di Kampung Adat Lubuk Jering Kecamatan Sungai Mandau Kabupaten Siak, diketahui beberapa faktor penghambat pelaksanaan pembinaan kehidupan sosial budaya masyarakat kampung Lubuk Jering, antara lain:

1. Respon masyarakat sebagai target dari pembinaan kehidupan sosial budaya masih rendah sehingga partisipasi masyarakat masih cukup rendah
2. Koordinasi antar lembaga yang ada di Kampung Belum maksimal dan kerja sama yang baik antara Penghulu Kampung dengan lembaga pemasyarakatan Kampung seperti Karang Taruna, Lembaga Adat, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat desa dan lembaga Perempuan, sehingga Penghulu Kampung tidak efektif dalam melakukan pengadaan acara adat/kebudayaan dalam pelestarian kebudayaan masyarakat Kampung.
3. pengawasan yang dilakukan oleh Penghulu Kampung tidak dilakukan secara langsung melainkan di wakikan dan penghulu Kampung sering tidak ada di tempat saat kegiatan di laksanakan terhadap kehidupan masyarakat Kampung Adat Lubuk Jering yang masih membutuhkan bimbingan dari pemerintahan Kampung.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah melakukan penelitian mengenai Pelaksanaan Kewenangan Penghulu Kampung Dalam Membina Kehidupan Sosial Budaya Masyarakat Di Kampung Adat Lubuk Jering Kecamatan Sungai Mandau Kabupaten Siak mengenai perencanaan melalui penganggaran kegiatan pembinaan pada anggaran pendapatan dan belanja Kampung yang di susun, bimbingan dari penghulu dalam kegiatan pembinaan sosial budaya, pengawasan dalam kegiatan pembinaan dan penilaian akhir dari kegiatan pembinaan kehidupan sosial budaya masyarakat kampung dapat disimpulkan bahwa:

1. Pada indikator Perencanaan diketahui bahwa rata-rata responden penelitian yaitu pemerintah desa, BAPEKAM, lembaga pemerberdayaan serta anggota lembaga yang aktif dan juga Kepala Dusun serta rukun Kampung menjawab bahwa indikator perencanaan dengan kategori cukup terlaksana rata-rata 23 responden, karena tidak disertakan strategi pelaksanaannya.
2. Indikator Bimbingan dengan tanggapan responden yang mendominasi indikator bimbingan dengan jawaban terlaksana dengan rata-rata 32 atau presentase 55%.
3. Indikator Pengawasan bahwa indikator pengawasan dengan kategori cukup terlaksana rata-rata 23 responden menyatakan tidak tahu mengenai perbaikan kegiatan sosial dan budaya di Kampung Lubuk Jering yang dilakukan oleh penghulu

4. Kemudian indikator Evaluasi Dari tabel indikator pengawasan diatas diketahui bahwa responden penelitian rata-rata menjawab cukup terlaksana dengan jumlah 28 responden dan persentase 48 maka dapat diketahui bahwa pengawasan yang dilakukan oleh Penghulu Kampung Adat dalam pembinaan Kehidupan sosial budaya dalam kategori Cukup Terlaksana

Dari tabel rekapitulasi diatas mengenai indikator pembinaan pada penelitian mengenai Pelaksanaan Kewenangan Penghulu Kampung Dalam Membina Kehidupan Sosial Budaya Masyarakat Di Kampung Adat Lubuk Jering Kecamatan Sungai Mandau Kabupaten Siak mengenai perencanaan melalui penganggaran kegiatan pembiaian pada anggaran pendapatan dan belanja Kampung yang di susun, bimbingan dari penghulu dalam kegiatan pembinaan sosial budaya, pengawasan dalam kegiatan pembinaan dan penilaian akhir dari kegiatan pembinaan kehidupan sosial budaya masyarakat kampung dapat disimpulkan bahwa Pelaksanaan Kewenangan Penghulu Kampung Dalam Membina Kehidupan Sosial Budaya Masyarakat Di Kampung Adat Lubuk Jering Kecamatan Sungai Mandau Kabupaten Siak dalam dengan rata-rata 26 atau 46% maka di kategorikan cukup terlaksana.

Adapun beberapa faktor penghambat yaitu respon masyarakat sebagai target dari pembinaan kehidupan sosial budaya masih rendah sehingga pasrtisipasi masyarakat masih cukup rendah kemudian koordinasi antar lembaga yang ada di Kampung Belum maksimal antara Penghulu Kampung dengan lembaga pemasyarakatan Kampung seperti Karang Taruna, Lembaga Adat, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat desa dan lembaga Perempuan, sehingga Penghulu Kampung tidak efektif dalam melakukan pengadaan acara adat/kebudayaan dalam

pelestarian kebudayaan masyarakat Kampung serta pengawasan yang dilakukan oleh Penghulu Kampung tidak dilakukan secara langsung melainkan di wakikan dan penghulu Kampung sering tidak ada di tempat saat kegiatan di laksanakan terhadap kehidupan masyarakat Kampung Adat Lubuk Jering yang masih membutuhkan bimbingan dari pemerintahan Kampung.

B. Saran

Adapun saran yang dapat diberikan antara lain:

1. Kepada Penghulu Kampung Adat Lubuk Jering untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dengan mengajak secara langsung juga dapat mengikut sertaka lembaga adat untuk melakukan penyebaran informasi kegiatan sosial budaya yang akan di laksanakan
2. Kepada Penghulu Kampung Adat Lubuk Jering untuk meningkatkan Koordinasi antar lembaga yang ada di Kampung seperti lembaga pemasyarakatan Kampung seperti Karang Taruna, Lembaga Adat, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat desa dan lembaga Perempuan, sehingga Penghulu Kampung tidak efektif dalam melakukan pengadaan acara adat/kebudayaan dalam pelestarian kebudayaan masyarakat Kampung.
3. Kepada Penghulu Kampung Adat Lubuk Jering untuk melakukan pengawasan secara langsung pada kegiatan pembinaan dan acara yang dilakukan khususnya sosial budaya di kampung.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku:

- Ernie, Tisnawati Sule, 2008. Pengantar Manajemen. Jakarta. Kencana.
- Brantas. 2009. *Dasar-Dasar Manajemen*. Alfabeta. Bandung.
- Hasibuan, Malayu. 2009. Manajemen, Dasar, Pengertian dan Masalah. Jakarta. PT. Bumi Aksara
- Hamim. Sufian. 2005. Adminisrasi, Organisasi dan Manajemen. Pekanbaru. UIR Press.
- Hayat, 2017. Manajemen Pelayanan Publik, Jakarta. Gunung Agung.
- Irfan Fachruddin, 2004. Pengawasan Peradilan Administrasi terhadap Tindakan Pemerintah, Alumni, Bandung.
- Kamal Hidjaz. 2010. Efektivitas Penyelenggaraan Kewenangan Dalam Sistem Pemerintahan Daerah di Indonesia. Pustaka Refleksi. Makasar.
- Kusdi, 2011. Teori Administrasi dan Organisasi. Jakarta. Salemba. Humanika.
- Manullang. 2009. *Manajemen*. Gajah Mada University. Press. Yogyakarta.
- Marbun, 2011. *Pengantar Administrasi Negara*. UII press. Yogya.
- Musanef. 2000. *Sumber Daya Manusia: Tinjauan Kualitas dan Kinerja*. Jakarta: Sinar Grafika
- Mustopadidjaja AR., 2003. SANKRI Prinsip-Prinsip Penyelenggaraan Negara. Jakarta. Gunung Agung.
- Ndraha, Taliziduhu. 2003. Kybernologi (ilmu Pemerintahan Baru). Jakarta. Rineka Cipta
- Ridwan HR. 2013. Hukum Administrasi Negara. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Siagian, P. Sondang. 2002. *Fungsi-Fungsi Manajerial*. Jakarta. Rineka cipta.

Siagian, Sondang. 2011. Manajemen Sumber daya manusia. Jakarta. Bumi Aksara.

Silalahi, Ulbert, 2003. *Studi Tentang ilmu Administrasi*. Bandung. Sinar Bagru

Aglesindo

Simanjuntak, B., I. L Pasaribu, 1990. Membina dan Mengembangkan Generasi Muda,
Tarsito, Bandung:

Siswanto. 2013. Pengantar Manajemen. Jakarta. Bumi Aksara.

Sitorus, Monang. 2009. Manajemen Pelayanan Publik. Badung. UNPAD

Sugiyono. 2002. *Metode Penelitian Administrasi.*, Bandung, Alfabeta

Syafiie, Inu Kencana, 2003. Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia
(SANKRI). Jakarta. Bumi Aksara

Safri Nugraha, dkk, 2007. Hukum Administrasi Negara, Fakultas Hukum Universitas
Indonesia

Thoha, Miftah. 2008. Ilmu Administrasi Kontemporer. Jakarta. Kencana.

Widjaja, A.W. 2003. Pemerintah Desa. Jakarta. PT. Grafindo Persada.

Winardi. 2009. Teori Organisasi dan Pengorganisasian. Jakarta, Rajawali

Zulkifli. 2005. Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan manajemen. Pekanbaru. UIR
Press

Jurnal

Ateng Syafrudin, 2000 .“Menuju Penyelenggaraan Pemerintahan Negara yang Bersih dan Bertanggungjawab”,Jurnal Pro Justisia Edisi IV, Universitas Parahyangan, Bandung, 2000.

Peraturan

Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Perubahan Penamaan

Desa Menjadi Kampung

Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Kampung

Adat di Kabupaten Siak

